

**EKSISTENSI PARTAI GERINDRA SEBAGAI OPOSISI DALAM SISTEM
PEMERINTAHAN DI INDONESIA DITINJAU DARI FIQH SIYASAH**



Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syariah**

Oleh :

Rahmatulloh

NPM : 1521020056

Jurusan : Siyasah Syar'iyah

Pembimbing I : Dr.H. Khairuddin., M.H

Pembimbing II: Dr. Jayusman,M.Ag

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERIRADEN INTAN LAMPUNG

2019/1440 H

ABSTRAK

Tidak adanya aturan yang jelas mengenai oposisi di Indonesia sedangkan keberadaan oposisi menjadi salah satu pilar dari demokrasi di Indonesia. Eksistensi oposisi pada dasarnya dibutuhkan, sebagai pengontrol negara, agar pemerintahan dan negara dapat menghindari keadaan *abuse of power* (penyalahgunaan kekuasaan). Dengan demikian kehadiran oposisi membuat negara menjadi kuat.

Hal tersebut membuat penulis tertarik untuk membuat karya tulis ilmiah adapun masalahnya sebagai berikut: Bagaimana eksistensi partai Gerindra sebagai oposisi dalam sistem pemerintahan di Indonesia? Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap partai oposisi dalam sistem pemerintahan di Indonesia?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui eksistensi partai Gerindra sebagai oposisi dalam sistem pemerintahan di Indonesia di tinjau dari Fiqh Siyasah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yang menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Reserch*) dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah metode wawancara dan metode dokumentasi dengan metode pengolahan data *editing* dan *systematizing*. Kemudian data yang terkumpul diolah menggunakan pendekatan berfikir deduktif. Setelah semua data terkumpul penulis menganalisis secara kualitatif.

Hasil dari penelitian ini ialah bahwa oposisi sebenarnya bukanlah sesuatu hal yang tabu dalam nomokrasi Islam. Adanya oposisi ini dapat menjadi penyeimbang bagi kekuasaan pemerintah, sehingga mereka harus terbatas selalu diawasi dan dikontrol. Oposisi tidak hanya dilakukan oleh lembaga, tetapi dapat juga dilakukan oleh pribadi-pribadi dalam masyarakat Islam. Allah Swt mendorong umat Islam untuk tidak hanya tinggal diam terhadap suatu kemungkaran. Mereka tidak harus terbatas hanya melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan dari diri sendiri, tetapi mereka harus berusaha sampai di semua tempat dan manusia menjadi seperti itu. Jadi, mengubah kemungkaran adalah kewajiban setiap individu

Adapun simpulan dalam hal ini bahwa sikap Gerindra sebagai oposisi memperjuangkan persamaan (*al-musawah*) hak dalam masyarakat, berusaha menegakan keadilan (*al-adalah*), dan memperjuangkan kebebasan (*al-hurriyah*) masyarakat untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. Analisa kebijakan yang ditetapkan oleh pihak yang berkuasa perlu dilakukan terus-menerus. Hal ini sebagai tanggung jawab organisasi, sosial, dan moral dari partai Gerindra sebagai oposisi. oposisi dalam Islam yang dilakukan oleh partai Gerindra diperbolehkan bahkan sangat dianjurkan untuk menegakan tujuan oposisi yaitu *amar makruf nahi munkar*. Hal yang dilarang adalah sikap oposisi yang hanya bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan. Tugas oposisi memastikan sistem ketatanegaraan Islam memiliki asas operasional yang terdiri atas empat hal, yaitu asas persamaan (*al-musawah*), asas *hurriyah*). Adapun kritik terhadap partai Gerindra agar tidak melakukan oposisi yang

Destruktif yang berusaha merusak citra pemerintah. yang menyoroti kelemahan-kelemahan pemerintah untuk merusak kewibawaan penguasa, Adanya kader-kader Partai Gerindra yang tidak berintegritas sehingga tidak dapat memperjuangkan aspirasi rakyat, Adanya kader-kader Partai Gerindra yang melaksanakan gerakan politiknya yang tidak sesuai dengan Visi Misi Partai. Adapun saran kepada partai Gerindra adalah Kepada Ketua, Pengurus, Kader, serta simpatisan DPD Partai Gerindra Provinsi Lampung agar konsisten melakukan Oposisi konstruktif secara konsisten dan objektif baik di parlemen maupun di luar parlemen terhadap kebijakan pemerintah yang di anggap salah, Kepada Pengurus DPD Partai Gerindra Provinsi Lampung agar mengusung kader yang Berintegritas, yang dapat memperjuangkan Aspirasi rakyat, Kepada ketua, pengurus, Kader Partai Gerindra, serta simpatisan DPD Partai Gerindra Privinsi Lampung agar menjalankan oposisi yang sesuai dengan Visi Misi Partai.





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Let. Kol H.Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara :

Nama : Rahmatulloh

NPM : 1521020056

Jurusan : Siyasah Syar'iyah

Fakultas : Syari'ah

Judul : EKSISTENSI PARTAI GERINDRA SEBAGAI
OPOSISI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DI
INDONESIA DITINJAU DARI FIQH SIYASAH

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang
munaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden
Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Kharuddin, M.H.
NIP.196210221993031002

Dr. Jayusman, M.Ag
NIP.197411062000031002

Mengetahui
Ketua Jurusan Siyasah Syar'iyah

Drs. Susiadi AS., M.Sos.I.
NIP.195808171993031002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Let. Kol H.Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PENGESAHAN

**Skripsi dengan judul : EKSISTENSI PARTAI GERINDRA
SEBAGAI OPOSISI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN
DI INDONESIA DITINJAU DARI FIQH SIYASAH.** disusun
oleh : **Rahmatulloh**, NPM 1521020056, Program study : Hukum
Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah), telah diajukan dalam sidang
Munaqasah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung, pada Hari/Tanggal :

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Drs. Henry Iwansyah, M.A

Sekretaris : Arif Fikri S.H.I, M.Ag

Penguji I : Dr. Alamsyah., S.Ag, M.Ag

Penguji II : Dr. Khairuddin, M.H.

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah**

Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.
NIP.197009011997031002

PERSEMBAHAN

Skripsi sederhana ini kupersembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada :

1. Kedua orang tua ku ayahanda Haznawi Alm. Dan ibu Sri Rukmiati yang telah tulus ikhlas membesarkan, membiayai, serta mendoakan ku hingga aku dapat menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, senyum bahagia kalian menjadi tujuan terbesar dalam hidupku, semoga Allah selalu melindungimu dimanapun berada. Dan untuk ayahku semoga Allah Swt menempatkan dirimu di surga-Nya.
2. Kakak-kakak ku Evi Yanti, Komarudin, dan Ahmad Taufik yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan demi keberhasilanku.
3. Sahabat Pance Pondang Nia, Faroid, Sari, Iwe, Ipe, Rahmayang selalu menemani dalam suka maupun duka, serta memberikan dukungan kepadaku.
4. Rafa Kholidah yang selalu mendukung dan mendampingiku untuk menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
5. Teman-teman Pejantan Tangguh yang saling mendukung dan menemani dibangku perkuliahan.
6. Sahabat-sahabat PMII Rayon Syari'ah Cur, Andre, Billy, Gea, Gusti, Nico, Riando, Dikin, Dini, Tyas, Sysca, Alex dan Dono.
7. Teman-temanku seperjuangan Andre, Fir, Nasrul, Fikri, Fadil, Sandi yang saling memberikan motivasi.

MOTTO

“ Kesadaran adalah matahari, Kesabaran adalah bumi,
Keberanian menjadi cakrawala, dan Perjuangan adalah
Pelaksana kata-kata”

WS. Rendra (1935-2009)



RIWAYAT HIDUP

Rahmatulloh, lahir pada tanggal 5 Juni 1997 di Sinar Harapan Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus. Merupakan putra bungsu dari pasangan bapak Haznawi Alm. Dan ibu Sri Rukmiati.

Pendidikan yang pernah ditempuh :

1. SDN 2 Sinar Semendo (Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus) lulus tahun 2009.
2. MTSN Model Talang Padang (Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus) lulus tahun 2012.
3. MAN 1 Pringsewu (Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu) lulus tahun 2015.
4. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Fakultas Syari'ah mengambil jurusan Siyasa Syar'iyah (Hukum Tata Negara).

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha penyayang puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. Atas segala nikmat dan karunia-Nya, dan atas semua yang telah dianugerahkan-Nya kepada penulis. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada pembawa risalah Allah, Nabi Muhammad Saw, keluarga, sahabat dan orang-orang yang telah memberi dorongan serta motivasi kepada penulis.

Skripsi ini berjudul **“EKSISTENSI PARTAI GERINDRA SEBAGAI OPOSISI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA DITINJAU DARI FIQH SIYASAH”**. Selesaiannya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dorongan, uluran tangan, dari berbagai pihak. Untuk itu, sepantasnya disampaikan ucapan terimakasih yang tulus dan do’a, mudah-mudahan bantuan yang diberikan tersebut mendapat imbalan dari Allah Swt yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ucapan terimakasih ini diberikan kepada :

1. Prof. Dr. Moh. Mukri, M.Ag, Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Drs. Susiadi, AS, M.Sos.I selaku ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah) Fakultas Syari’ah.
4. Dr. Khairuddin, M.H. selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan dorongan serta motivasi kepada mahasiswa.
5. Dr. Jayusman, M.Ag. selaku pembimbing II yang selalu memberikan semangat positif kepada mahasiswa.

6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah yang telah mendidik, memberikan waktu dan layanannya dengan tulus dan ikhlas selama menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
7. Bapak dan ibu staf karyawan perpustakaan Fakultas Syari'ah dan perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung.
8. Seluruh keluarga, sahabat yang senantiasa memberi motivasi baik moril maupun materil.

Dapat disadari bahwa hasil penelitian dan tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini tidak lain disebabkan karena keterbatasan ilmu, waktu dan dana yang dimiliki. Untuk itu kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran guna melengkapi tulisan ini.

Kepada Allah Swt penulis memohon ampun dan hidayah. Semoga Allah Swt mengampuni dosa, kesalahan kita dan meridhoi amal baik dan jasa dari semua pihak yang membantu menyelesaikan skripsi ini, serta kepada setiap pembaca semoga memperoleh manfaat.

Bandar Lampung, 28 Februari 2019

Penulis

Rahmatulloh

NPM. 1521020056

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
C. Latar Belakang Masalah	4
D. Rumusan Masalah	15
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	15
F. Metode Penelitian	16
BAB II GAMBARAN UMUM OPOSISI ISLAM	
A. Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Oposisi	
1. Pengertian Oposisi	22
2. Dasar Hukum Oposisi	28
3. Sejarah Oposisi	33
4. Aliran-Aliran Oposisi.....	39
5. Tugas Oposisi.....	47
5.Tujuan Oposisi	52

BAB III LAPORAN PENELITIAN

A. Partai Gerindra sebagai Partai Oposisi

1. Sejarah Partai	55
2. Visi dan Misi Partai	61
3. Jati Diri Partai	62
4. Pokok-Pokok Perjuangan Partai	63
5. Struktur Organisasi Partai	65
6. Gerindra Di Parlemen	66

B. Eksistensi Partai Gerindra Sebagai Oposisi dalam

Sistem Pemerintahan di Indonesia	70
--	----

C. Faktor Penghambat Partai Gerindra sebagai

oposisi di dalam sistem pemerintahan di Indonesia.....	80
--	----

BAB IV ANALISIS DATA

A. Eksistensi Partai Gerindra Sebagai Oposisi dalam

sistem pemerintahan di Indonesia	85
--	----

B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Partai Oposisi

dalam sistem Pemerintahan di Indonesia	87
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	92
--------------------	----

B. Saran	93
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan salah interpretasi dalam memahami judul skripsi ini, terlebih dahulu akan dijelaskan beberapa istilah guna memperjelas persepsi pokok bahasan, Perlu penjelasan judul dengan makna atau definisi yang terkandung didalamnya. Judul skripsi ini adalah “Eksistensi Partai Gerindra Sebagai Oposisi Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Ditinjau Dari Fiqh Siyasah”.

Adapun beberapa hal penting yang perlu dijelaskan sehubungan dengan judul tersebut adalah sebagai berikut :

Eksistensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tentang hal berada atau keberadaan.¹Partai menurut Ramlan Surbakti merupakan kelompok anggota yang terorganisasi secara rapi dan stabil yang dipersatukan dan dimotivasi dengan ideologi tertentu, dan yang berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan melalui pemilihan umum guna melaksanakan alternatif kebijakan umum yang mereka susun.²Gerindra adalah sebuah partai politik di Indonesia yang berideologikan Pancasila yang memiliki jati diri partai yaitu kebangsaan,

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi keempat* (Jakarta: PT G ramedia Pustaka Utama, 2011) h.1051

² Cholisin dan Nasiwan, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Yogyakarta : Ombak 2012) h. 111

kerakyatan, religius, dan keadilan sosial.³ Oposisi adalah partai penentang di dewan perwakilan dan sebagainya yang menentang dan mengkritik pendapat atau kebijaksanaan politik golongan yang berkuasa. Atau kelompok kekuatan yang ingin mengontrol negara, agar pemerintahan dan negara dapat menghindari keadaan *abouse of power* (penyalahgunaan kekuasaan).⁴

Sistem Pemerintahan Indonesia adalah suatu susunan atau tatanan berupa strukturyang terdiri dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang berkaitan satu dengan yang lainnya secara teratur dan terencana untuk mencapai tujuan. Dan apabila salah satu komponen atau bagian tersebut berfungsi melebihi wewenangnya atau kurang berfungsi maka akan mempengaruhi komponen lainnya. Sehingga sistem pemerintahan adalah keseluruhan dari susunan atau tatanan yang teratur dari lembaga-lembaga negara yang berkaitan satu dengan yang lainnya baik langsung maupun tidak langsung menurut suatu rencana atau pola untuk mencapai tujuan negara Indonesia.⁵

Fiqh Siyasahadalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan umat itu sendiri. Dalam fiqh siyasah ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam, yang terkandung di dalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sebagai ilmu ketatanegaraan

³*Dokumentasi*, Manifesto Partai Gerindra Jakarta, dicatat september 2008. h. 20

⁴Zaenuddin,. *Prospek Gerakan Oposisi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2001) h. 2

⁵Efriza, *Ilmu Politik Dari Ilmu Politik sampai Sistem Pemerintahan*, (Bandung : Alfabeta Cv, 2008) h. 263

dalam Islam Fiqh Siyasah antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan, dan bagaimana cara-cara pelaksanaan kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggung jawabkan kekuasaannya.

6

Berdasarkan penjelasan diatas, maka yang dimaksud dari judul Eksistensi Partai Gerindra Sebagai Oposisi Dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia Ditinjau Dari Fiqh Siyasah adalah meninjau dan memberi pandangan berdasarkan Fiqh Siyasah mengenai Peran Oposisi baik itu di parlemen maupun di luar parlemen yang berusaha untuk mengontrol dan mengoreksi suatu kebijakan pemerintah yang dianggap keliru dan salah.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan yang mendorong penulis memilih judul skripsi tersebut adalah:

1. Alasan Obyektif

- a. Tidak adanya aturan yang jelas mengenai oposisi di Indonesia sedangkan keberadaan oposisi menjadi salah satu kunci dari demokrasi di Indonesia. Pemilihan Partai Gerindra sendiri dalam judul skripsi ini dikarenakan ketua umum partai Gerindra yaitu Prabowo Subianto adalah Pimpinan Koalisi Merah Putih yang hingga saat ini konsisten menjadi pihak oposisi.

⁶Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014) h. 4

- b. Meninjau berdasarkan Fiqh Siyasah mengenai Eksistensi Partai Gerindra sebagai Oposisi dalam sistem pemerintahan di Indonesia.

2. Alasan Subyektif

- a. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang eksistensi oposisi di dalam pemerintahan di Indonesia.
- b. Tersedianya literatur yang menunjang untuk penyelesaian skripsi ini.
- c. Permasalahan yang dipilih oleh penulis sangat relevan dengan disiplin ilmu di Fakultas Syariah Jurusan Siyasah.

C. Latar Belakang

Para *Founding Fathers* Republik Indonesia telah bersepakat bahwa ketatanegaraan yang berlaku adalah yang mengakui prinsip-prinsip Demokrasi.⁷ Demokrasi tidak muncul begitu saja di suatu negara tanpa sebab. Demokrasi muncul dan berkembang melalui pikiran dan perjuangan individu, kelompok, dan aktor-aktor sosial. Ia lahir dan berkembang dalam dialektika kekuasaan yang panjang, sepanjang kehidupan politik negara dari waktu ke waktu.⁸ Salah satu komponen negara Demokrasi yang membedakannya dengan negara non demokrasi misalnya Sosialis, Komunis, dan Fasis adalah hadirnya unsur oposisi. Eksistensi oposisi pada dasarnya dibutuhkan, karena ia dapat sebagai pengontrol negara, agar pemerintahan dan negara dapat menghindari

⁷ Henry Raymond dan Singgih Agung, *Politik Kewarganegaraan* (Jakarta : Erlangga 1999) h.126

⁸ Suparman Marzuki, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*, (Erlangga : Jakarta 2014) h. 14

keadaan *abuse of power* (penyalahgunaan kekuasaan). Dengan demikian kehadiran oposisi membuat negara menjadi kuat.

Jadi bila ditinjau peranan *check and balance*-nya, oposisi bukanlah sesuatu yang mengkhawatirkan atau bahkan menakutkan. Oposisi justru dibutuhkan untuk minimal menjaga kelanggengan penyelenggaraan negara demokrasi. Oposisi kerap kali didefinisikan sebagai kelompok kekuatan yang mengontrol dan mengoreksi suatu kebijakan pemerintah yang dianggap keliru dan salah. Oposisi merupakan salah satu bentuk aktualisasi dari perbedaan pendapat di masyarakat dalam proses berbangsa dan bernegara. Dan adanya perbedaan pendapat itu orang bijak menganggapnya sebagai karunia Tuhan yang harus disyukuri menjadi indikasi ke arah demokrasi. Masalahnya, adakah kesediaan untuk berbeda pendapat, antar individu, antar kelompok masyarakat, antar warga negara dengan pemerintah, dan lebih khusus antar oposisi dan penguasa.

Kesediaan untuk mengoreksi dan mengkritik, kesediaan untuk dikoreksi dan dikritik dan kesediaan untuk berbeda pendapat inilah sebagai kunci pembuka untuk memasuki gerbang demokrasi. Karena itulah menurut pakar politik Arbi Sanit, keberadaan oposisi sebagai soko guru dari demokrasi dan setiap demokrasi harus memiliki oposisi, walaupun tidak semua oposisi mampu menegakkan demokrasi. Namun tanpa oposisi, demokrasi itu terancam atau justru mati karena dalam demokrasi penguasa harus dikontrol. Penguasa tidak boleh dibiarkan bekerja sendiri lantaran kekuasaan itu cenderung menyimpang. Orang-orang yang

sedang berkuasa bisa terjebak dalam penyalahgunaan kekuasaan. Jadi wajib diawasi dan dikontrol oleh pihak oposisi.⁹

Setidaknya menurut Khairuddin secara umum diketahui ada tiga jenis pengelolaan kekuasaan politik oleh parpol, yakni dominasi partai pemenang dengan adanya partai oposisi adalah realitas politik yang dijumpai ketika partai-partai yang kalah, baik sendiri maupun bersama-sama dalam koalisi, mampu bersikap resisten dan kritis terhadap dominasi yang dipegang oleh partai pemenang pemilu.¹⁰ Sesuai dengan fungsi dari partai politik sebagai kontrol politik adalah kegiatan untuk menunjukn kesalahan, kelemahan, dan penyimpangan dalam suatu kebijaksanaan atau dalam pelaksanaan suatu kebijaksanaan. Partai menjadi wadah bagi pilihan suara rakyat, dengan begitu partai haruslah mendemonstrasikan pandangan atau Visi Misinya untuk secara terus menerus memperbaiki nasib bangsa dan rakyat.¹¹ Karna partai akan memperjuangkan suatu kebenaran yang menurut pandangan mereka paling idealis dalam suatu level tingkat negara.¹²

Sesuai dengan fungsi dari partai politik sebagai kontrol politik adalah kegiatan untuk menunjukkan kesalahan, kelemahan, dan penyimpangan dalam suatu kebijakan atau dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Dalam melakukan suatu

⁹Zaenuddin, *Op.Cit.*, h. 2-3

¹⁰ Efriza, *Political Explore*, (Alfabeta : Bandung 2012) h. 301

¹¹ Sri Bintang Pamungkas, *Dari Orde Baru ke Indonesia Baru Lewat Reformasi Total* (Erlangga : Jakarta 2001) h. 302

¹² Inu Kencana Syafii dan Azhari, *Sistem Politik Indonesia*, (Refika Adi Tama : Bandung 2008) h.78

kontrol atau pengawasan partai Gerindra haruslah berdasarkan kriteria atau norma, sehingga kegiatan itu objektif sifatnya.

Melakukan suatu kegiatan kontrol atau pengawasan tanpa suatu kriteria yang jelas, maka kontrol itu tidak akan mempunyai arah. Kriteria suatu kontrol politik adalah nilai-nilai politik yang dianggap ideal oleh masyarakat (ideologi) yang dijabarkan kedalam berbagai kebijaksanaan umum atau peraturan perundang-undangan. Partai politik seperti Gerindra memiliki salah satu fungsi untuk melakukan kontrol politik tersebut. Tujuan suatu kontrol politik adalah meluruskan kebijakan atau pelaksanaan kebijakan yang menyimpang, dan memperbaiki yang keliru sehingga kebijakan dan pelaksanaan suatu kebijakan sejalan dengan ideologi nasional.¹³ Sudah menjadi fungsi partai politik untuk memadukan semua aspirasi yang ada dalam masyarakat yang kemudian dirumuskan sebagai program politik dan diusulkan kepada legislatif yang berada diparlemen.¹⁴

Partai Gerindra sebagai institusi yang selalu menganalisa dan mengawal perubahan sosial juga perlu melihat struktur yang membentuk interaksi sosial. Dalam sistem demokrasi, penting sekali peran pemerintah dalam membentuk struktur dan interaksi sosial. Pemerintah diberi dan memiliki basis legitimasi yang kuat untuk menyusun peraturan sosial seperti pembentukan undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah. Selain itu, pemerintah diberi

¹³Elly M.Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015) h. 286

¹⁴ A. Rahman , *Sistem Politik Indonesia* (Yogyakarta : Graha Ilmu 2007) h.104

kewenangan untuk melakukan dan menggunakan cara-cara yang bersifat *coercive* untuk menjamin terlaksannya semua peraturan yang telah ditetapkan. Misalnya, dengan memobilisasi polisi dan angkatan bersenjata, kekuasaan pemerintah menjadi lengkap untuk menyusun, mengimplementasikan, dan mengontrol pelaksanaan peraturan. Hal inilah yang menjadi berbahaya jika tidak adanya kontrol politik, karena hukum adalah *dependent variable* (variable terpengaruh) sedangkan politik sebagai *independent variable* (variable berpengaruh) karena kenyataannya hukum sebagai peraturan yang abstrak (pasal-pasal imperatif) merupakan kristalisasi kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan bersaing.¹⁵

Sehingga, sudah sewajarnya semua struktur, interaksi, dan kondisi yang ada dalam masyarakat tidak terjadi dengan sendirinya. Pasti ada yang mengkondisikan, membentuk, dan mengarahkannya. Baik buruk kondisi yang terjadi perlu dikritisi. Menganalisa setiap perkembangan dalam masyarakat perlu melihat kualitas struktur peraturan yang membentuknya. Sehingga, mau tidak mau, partai Gerindra perlu terus-menerus melihat keterkaitan antara kondisi dan situasi sosial dengan setiap kebijakan dan peraturan pemerintah. Analisa kebijakan yang ditetapkan oleh pihak yang berkuasa perlu dilakukan terus-menerus. Hal ini sebagai tanggung jawab organisasi, sosial, dan moral dari partai oposisi.

¹⁵ Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015) h. 10

Secara jelas Islam mewajibkan kepada kaum muslimin untuk taat kepada *umara* dan mengharamkan kepada setiap kaum muslimin untuk mendurhakai perintah amir. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ط

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Nya, dan Ulil Amri diantara kalian”(Q.S An-Nisa 59)¹⁶

Kepatuhan individu kepada Negara merupakan hak syar'i (hak yang bersumber pada syari'at) negara atas warganya karna Agama adalah Undang-Undang Tuhan yang ditujukan kepada orang-orang yang mempunyai akal sehat, dengan kemauan mereka dapat membawa kepada apa yang terbaik di saat sekarang dan di masa datang.¹⁷

Setiap individu wajib melaksanakan perintah-perintah, peraturan-peraturan dan rencana-rencana yang telah ditetapkan negara untuk merealisasikan kepentingan umum dan tujuan-tujuan negara. Hal ini dikarenakan ketaatan merupakan salah satu sendi hukum Islam dan kaidah ketatanegaraannya. Seseorang akan sulit membayangkan keberadaan suatu sistem yang sehat, negara yang kuat dan tetap, jika tidak ada pemerintahan yang adil, rakyat yang taat kepada pemimpin dan berlangsungnya musyawarah antara pemerintah dengan rakyat. Islam sangat

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta : Pt. Aku Bisa 2014)h.87

¹⁷ Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta : Amzah 2005) h.255

menganjurkan musyawarah terbukti pada masa nabi, banyak persoalan umat diselesaikan dengan *syura* (permusyawarahan) antara beliau dan para sahabatnya.¹⁸

Walaupun Islam menekankan kepada umatnya untuk mentaati *ulilamri* (pemerintah), tetapi ketaatan ini tidak bersifat absolut. Sebab ketaatan yang absolut akan mengakibatkan pemerintahan individualistik, diktator dan totalitas. Oleh karena itu Islam mewajibkan kepada rakyat untuk mentaati *ulilamri* itu dalam batas-batas tertentu.

Dalam sistem pemerintahan Islam, Khalifah, kepala negara, atau imam hanyalah seseorang yang dipilih umat untuk mengurus dan mengatur kepentingan mereka demi kemaslahatan bersama. Posisinya dalam masyarakat Islam digambarkan secara simbolis dalam ajaran salat berjamaah. Imam yang dipilih dalam memimpin salat berjamaah adalah orang yang memiliki kelebihan, baik dari segi kealiman, *fashahah*, maupun ketakwaannya, dari yang lainnya. Dalam salat tersebut, imam memimpin salat hanya berjarak beberapa langkah didepan makmum. Ini dimaksudkan supaya makmum dapat mengetahui gerak-gerik imam. Seandainya imam keliru dalam salat, maka makmum dapat melakukan “koreksi” terhadapnya tanpa mengganggu dan merusak salat itu sendiri.¹⁹

Ini mengisyaratkan bahwa kepala negara bukanlah pribadi yang luar biasa, yang tidak pernah salah. Karenanya kepala negara tidak boleh berada jauh dari

¹⁸ Abu Yasid, *Fiqh Today*, (Jakarta : Erlangga, 2002) h. 76

¹⁹ Iqbal., *Op.Cit.*, h . 241

rakyatnya. Ia harus dapat mendengar dan menyahuti aspirasi rakyatnya dan menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Gerakan oposisi di Indonesia yang dilakukan partai Gerindra merupakan sikap penentangan terhadap kesewenang-wenangan pemerintah yang berkuasa, dengan kata lain sikap ini bertujuan untuk mengingatkan pemerintah agar tetap memprioritaskan kepentingan rakyat. Sikap seperti ini dalam Islam diperbolehkan bahkan sangat dianjurkan untuk menegakkan prinsip *amar ma'ruf nah imunkar*. hal yang dilarang adalah sikap oposisi yang hanya bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan, seperti yang pernah terjadi pada masa demokrasi parlementer.

Dalam hal ini Islam mengajarkan umatnya untuk selalu saling menasehati dan melakukan kontrol atas kekuasaan agar kebaikan selalu terpelihara dalam kehidupan masyarakat sebagaimana dalam firman Allah Swt :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“ Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung”. (Q.S. Al-Imran 104).²⁰

Hal ini mengisyaratkan bahwa oposisi sebenarnya bukanlah sesuatu hal yang tabu dalam nomokrasi Islam. Istilah nomokrasi adalah istilah yang paling tepat

²⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta : Pt. Aku Bisa 2014) hlm. 63

untuk dipergunakan dalam penyebutan negara hukum, versi syariat Islam meliputi prinsip kekuasaan sebagai Amanah, prinsip Musyawarah, Prinsip keadilan, prinsip pengakuan dan perlindungan setiap hak-hak manusia.²¹ adalah pilihan yang paling tepat Adanya oposisi ini dapat menjadi penyeimbang bagi kekuasaan pemerintah, sehingga mereka merasa selalu diawasi dan dikontrol. Oposisi tidak hanya dilakukan oleh lembaga, tetapi dapat juga dilakukan oleh pribadi-pribadi dalam masyarakat islam.²²

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E ayat (3) bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat adalah salah satu dasar bagi tindakan partai Gerindra selaku oposisi pemerintahan, dalam rangka mewujudkan keadilan dan kebenaran. Menurut Islam, segala sesuatu yang tidak melanggar hukum adalah sepenuhnya diperbolehkan. Dengan demikian tindakan oposisi (*check and balance*) yang dilakukan partai Gerindra terhadap pemerintah di Indonesia dibolehkan selama tidak melanggar undang-undang yang berlaku atau dengan kata lain harus konstitusional.²³

Namun partai oposisi di Indonesia saat ini banyak yang tidak menjalankan fungsi kontrol politik, dengan banyaknya partai Oposisi yang bergabung dengan pemerintahan. diawali oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada oktober

²¹ Zuhraini, “ *Kontribusi Nomokrasi Islam (Rule of Islamic Law) Terhadap Negara Hukum Pancasila*” *Jurnal Al-Adalah*, Vol 12, No (2014) (Bandar Lampung : Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, 2014) h.1. (On-line), tersedia di <http://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.182> (21 Mei 2019) Dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah.

²² Iqbal *Op.Cit.*, h. 240-241

²³ Cholisin dan Nasiwan. *Op.Cit.* h. 52

2014, Partai Amanat Nasional (PAN) september 2015, dan partai Golongan Karya (GOLKAR) pada januari 2016. Keadaan ini tentunya menjadi titik lemah *check and balance* terhadap pemimpin yang berkuasa. Dalam penyaluran aspirasi kritisnya partai Gerindra sendiri sebagai partai oposisi cenderung melemah, dengan banyaknya koalisi Merah Putih yang bergabung dengan Koalisi Indonesia hebat, hal ini menunjukkan bahwa suatu koalisi yang dibentuk adalah suatu koalisi semu karna pada pemilu tahun 2019 PAN kembali bergabung dengan koalisi yang digalang partai Gerindra yaitu Koalisi Adil Makmur. Terdapat dua mekanisme partai Gerindra dalam menyalurkan sikap kritisnya terhadap pemerintah. Pertama, sikap kritis disalurkan dan dicerminkan oleh wakil-wakil partai Politik yang terdapat dalam lembaga legislatif. Dengan kata lain jika lembaga legislatif banyak yang mendukung pemerintah maka aksi kritis ini pun akan berkurang. Ketika partai Oposisi melihat ketidak beresan dalam situasi dan kondisi sosial masyarakat, mereka dapat mengusulkan rancangan undang-undang yang dapat mengubahnya. Pada kenyataanya hal ini tidak mudah dan otomatis dapat dilakukan, mengingat pola pengambilan keputusan yang cukup kompleks dan kerap terjadi negosiasi politik antarfraksi. Kedua, partai Gerindra dapat menyuarakan analisis dan sikap kritisnya melalui jalur non-parlementer. Misalnya dengan melakukan diskusi dan debat publik tentang kebijakan pemerintah. bisa juga dilakukan dialog dengan media massa untuk pembentukan opini publik sehingga mendapatkan dukungan politis publik.²⁴

²⁴Firmanzah, *Mengelola Partai Politik*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2008) h. 73

Jika kita berbicara tentang ketidakberdayaan oposisi di Indonesia, pokok soalnya berpusar pada kekakuan struktur politik dan keterbelakangan sikap kultural kita. Maka kerap kali kita membaca analisis bahwa perkembangan kehidupan oposisi bertumpu pada suatu kata demokratisasi. Sekalipun klise, namun tampaknya memang inilah agenda utama sistem politik kita saat ini, yaitu demokratisasi dalam pengertiannya yang mendasar sebagaimana dikonseptualisasikan Robert A.Dahl dalam *Democracy Its Critics* (1989) kebebasan untuk berbeda pendapat dan pendirian. Pengembangan martabat manusia dengan otonomi menentukan nasib sendiri yang disertai otonomi moral untuk bertanggung jawab serta kepastian melindungi dan memajukan kepentingan setiap orang.²⁵

Yang menjadi kebutuhan operasional dan konkret saat ini pertama-tama adalah memperbaiki cara pandang kita tentang proses demokratisasi. Teori demokrasi yang ditarik lokomotif yang menumpukan diri pada peran lingkaran elite politik cenderung akan menghasilkan demokrasi yang semu dan setengah hati. Diperlukan cara pandang baru yang melihat demokratisasi sebagai sebuah proyek massal yang menyentuh penguatan seluruh elemen masyarakat sipil. Demokratisasi, dengan demikian tidak dipandang sebagai “gerakan menanti negara berhati baik” melainkan gerakan mendesak untuk mengubah setiap negara melalui perubahan komposisi politik di dalamnya. atas nama kebutuhan oposisi,

²⁵ *Ibid.*, h. 74

agenda demokratisasi hanya akan berhenti menjadi slogan manakala tidak ada kearifan dari semua orang untuk memandang perbedaan sebagai kenyataan sejarah yang tidak bisa dibunuh.

D. Rumuan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana eksistensi Partai Gerindra sebagai oposisi dalam sistem pemerintahan di Indonesia?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap partai oposisi dalam sisitem pemerintahan di Indonesia?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Eksistensi partai Gerindra sebagai partai oposisi dalam sistem pemerintahan di Indonesia.
- b. Untuk menganalisis pandangan Fiqh Siyasah tentang partai Oposisi dalam sistem pemerintahan di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Secara Teoritis

1) Hasil penelitian ini sebagai bahan kajian dalam rangka pengembangan ilmu dibidang politik dan sistem ketatanegaraan, khususnya yang berkaitan dengan Hukum Tata Negara.

2) Untuk memberikan sumbangan pemikiran tentang pemikiran politik, khususnya yang berkaitan dengan politik Islam dilingkungan akademis perguruan tinggi dan sumbangan perbendaharaan pustaka dalam ilmu Hukum Tata Negara.

b. Kegunaan Secara Praktis

1) Untuk dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti berikutnya.

2) Untuk memberikan sumbangan pemikiran untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dengan lebih praktis.

3) Untuk memenuhi syarat wajib bagi setiap mahasiswa dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, mengolah, dan membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh dan membahas dalam penelitian tersebut. Maka penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian Kepustakaan (*Llibrary Research*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan cara membaca buku-buku, majalah-majalah ataupun makalah atau sumber-sumber lain yang tersedia dan berkaitan dengan judul yang dimaksud dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat dalam perpustakaan.²⁶ Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder sebagai sumber data yang mendukung objek pembahasan eksistensi partai Gerindra sebagai oposisi dalam sistem pemerintahan di Indonesia.

2. Sifat Penelitian

Penelitian bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu metode dalam penelitian yang bertujuan mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini serta melihat kaitan antara peristiwa pada masa sekarang. Normatif karena mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang ditulis dalam buku-buku fiqh klasik, hadist

²⁶Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: pusat penelitian dan penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri RIL 2015) h. 10

Nabi SAW, maupun hukum positif yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.²⁷

3. Data dan Sumber Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam usaha mendapatkan informasi dalam penelitian ini, dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder yang sejalan dan searah pembahasan ini :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan diolah sendiri dari organisasi yang diterbitkan atau menggunakannya. Dalam hal ini data primer yang diperoleh dari hasil wawancara langsung kepada responden yang terdiri dari Ketua Dewan pimpinan daerah Gerindra provinsi Lampung, Pengurus Dewan Pimpinan Daerah partai Gerindra provinsi Lampung, Kader partai Gerindra, Simpatisan partai Gerindra, buku, undang-undang, dan peraturan tentang oposisi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan penelitian atau data yang dikumpulkan diolah sendiri dengan cara mengumpulkan data-data dari berbagai sumber informasi dalam bentuk berbagai macam bahan bacaan. Misalnya : Buku,

²⁷ Abdul Malik Ghazali, “ Aborsi antara Hukum dan Dilema Perempuan “, *Jurnal Al-Adalah*, Vol 9 No. 01, Juni 2010 (Bandar Lampung: Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, 2010) , h. 201.dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah.

Majalah, Koran, Tafsir, Hadis, dan bacaan lain yang berkaitan dengan Eksistensi Partai Gerindra Sebagai Oposisi didalam Sistem Pemerintahan di Indonesia untuk kemudian diolah menjadi landasan teori.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang paling penting dalam penelitian, karena pengumpulan data primer dan data sekunder yang sejalan dan searah pembahasan ini dengan berbagai cara :

1) Metode Wawancara

Metode wawancara adalah metode atau cara pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan informan. wawancara dilakukan kepada informan yaitu orang-orang yang dianggap banyak mengetahui permasalahan yang terjadi, data interview dapat diperoleh dari hasil wawancara kepada informan yang terdiri dari Ketua Dewan pimpinan daerah Gerindra provinsi Lampung, Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Gerindra provinsi Lampung, Kader partai Gerindra, dan Simpatisan partai Gerindra.

2) Metode Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian.²⁸ Dokumentasi disini bermaksud menghimpun data berupa dokumen tentang situasi lapangan, selain itu metode dokumentasi yang dimaksud adalah suatu upaya untuk mengumpulkan bukti-bukti atau data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi.

5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data meliputi kegiatan sebagai berikut :

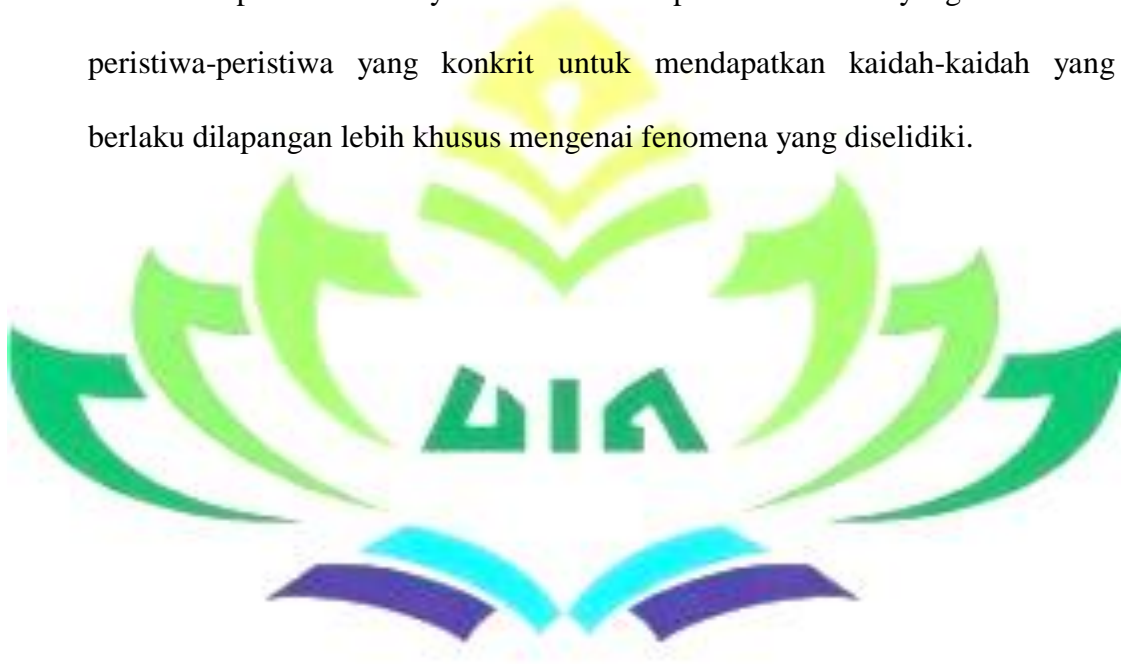
- a. *Editing* adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau terkumpul itu tidak lengkap dan meragukan. Tujuan *editing* adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan dilapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi atau diperbaiki.
- b. *Sistematizing* yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian yaitu Eksistensi partai gerindra sebagai oposisi

²⁸Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik* (Jakarta : RinekaCipta, 2006)
hlm 83

didalam sistem pemerintahan di Indonesia ditinjau dari fiqh siyasah yang akan dikaji menggunakan metode kualitatif, yang bertujuan untuk mengetahui peran partai gerindra sebagai oposisi dalam sistem pemerintahan di Indonesia, agar dapat memberikan kontribusi keilmuan dan pemahaman mengenai penelitian ini dilihat dari fiqh siyasah. Metode berpikir dalam penulisan menggunakan metode berpikir deduktif yaitu berdasarkan pada fakta-fakta yang umum dan peristiwa-peristiwa yang konkrit untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan lebih khusus mengenai fenomena yang diselidiki.



BAB II

GAMBARAN UMUM OPOSISI ISLAM

A. Tinjauan Fiqh Siyasah

1. Pengertian Oposisi

Secara Etimologis oposisi (*Muaradhah*) yang berasal dari kata *aradha* yang berarti bertemu, membandingkan, dan menyandingi. oposisi menurut definisi sastra tidak keluar dari akar makna etimologisnya berarti *al-muqabalah* (pertemuan atau perbandingan). didalamnya juga termasuk *mubarah* (pertandingan) disamping terlihatnya semangat *al-mughalabah* (pertikaian) dan *at-tahaddi* (tantangan).²⁹

Jika makna oposisi dikaitkan dalam bidang politik pasti berhubungan dengan salah satu model sistem politik yang mana kehidupan politik dibagi menjadi dua pihak, salah satunya berada dalam pemerintahan dan disebut sebagai pemerintah dan yang lain berada diluar pemerintah yang disebut dengan oposisi. Dengan begitu, orientasi makna kata tersebut tertuju pada struktur yang ada diluar pemerintah, apapun bentuknya. Bisa jadi ia berbentuk partai, kelompok, atau gerakan. Semua struktur ini berorientasi pada makna kata oposisi sebagai ekspresi kekuatan yang tidak mendukung pemerintah dan yang bersikap menentang atau menolak. Jika kita bertanya mengapa bisa terjadi perkembangan pada maknanya, kita dapati bahwa oposisi meskipun adalah kata yang diambil dari akar orisinal bahasa Arab, makna kata tersebut pada zaman sekarang sudah berkembang sebagai cermin dari pengaruh budaya asing-barat yang mana

²⁹Neveen Abdul Khalik Musthafa, *Oposisi Islam* (Yogyakarta : LkiS 2012) h. 5

diantara makna kata tersebut ada kesamaan dengan sejumlah makna yang disinyalir oleh kata *opposition* yang artinya berlawanan, khususnya pada bidang politik.³⁰

Dalam terminologi dapat di simpulkan bahwa arti epistemologi oposisi pada dasarnya lebih terpusat pada peran dari pada individu yang melakukan peran tersebut. Hubungan pihak manapun dengan peran ini tergantung oleh waktu tertentu. Disana juga terdapat pertukaran antarpihak dalam menjalankan peran tersebut. Dahl mendefinisikan kedua jenis peran oposisi yang dilakukan secara bergantian oleh (A) dan (B) tersebut sebagai oposisi aktif yang efektif dan oposisi pasif. Disisi lain, ada hal-hal lain yang menolak logika pergantian peran seperti yang ada dalam konsep barat diatas.³¹

Hal itu karena dalam pemikiran politik Islam sudah mengakar prinsip tidak mencari kuasa. Mencari kekuasaan adalah terlarang atau sesuatu yang tidak disukai. Oleh karena itu, semua gerakan oposisi usahanya ditujukan pada penerapan persepsi masing-masing yang paling ideal dan bukan untuk mencari kuasa. Oposisi dalam pemikiran politik islam dikenal menjadi dua bentuk, yaitu oposisi aktif dan oposisi pasif. Oposisi aktif terwujud dalam sejumlah sikap individu dan gerakan-gerakan kolektif yang terwujud dalam bentuk pemberontakan-pemberontakan atau dalam bentuk pemikiran oposisi.

³⁰ *Ibid.*, h. 6

³¹ *Ibid.*, h.7

Adapun oposisi pasif terlihat dalam sejumlah sikap beberapa sahabat yang mengasingkan diri dari konflik khilafah yang sedang terjadi. Sikap mereka seperti ini menjadi sandaran bagi beberapa persepsi yang mendukung konsep sabar sebagai metode untuk menyatakan oposisi pasif. Jadi melalui perbandingan ini jelas bahwa makna terminologi barat terhadap kata oposisi bukanlah makna yang terbesit dalam pikiran ketika kita berbicara tentang oposisi dalam pemikiran politik islam. Hal itu karena yang pertama kali terbesit dalam pikiran- pada konteks ini- adalah oposisi yang dilakukan berbagai faham dan mazhab yang dikenal sepanjang sejarah Islam, seperti Khawarij, Syiah.³² Seiring dengan perkembangan sistem pemerintahan di dunia, oposisi akhirnya muncul dalam beberapa varian konseptual. Saat ini setidaknya ada empat konsep oposisi yang pernah berkembang di berbagai dunia:

1. Oposisi Seremonial

Konsep oposisi yang pertama adalah oposisi seremonial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, seremonial dimaknai sebagai sesuatu yang bersikap upacara atau seremoni. Tetapi apabila kita maknai lebih jauh, seremoni dapat diartikan sebagai sesuatu yang bersifat resmi dan formal. Berdasarkan definisi tersebut, oposisi seremonial dapat diartikan sebagai konsep ‘oposisi tipu-tipu’ atau oposisi yang dibentuk hanya untuk

³²*Ibid.*, h. 10

formalitas saja. Oposisi seremonial sengaja dibentuk oleh pemerintah yang berkuasa supaya rakyat melihat sistem pemerintahan yang ada seakan-akan seimbang. Padahal, segala hal yang ada pada oposisi seremonial telah diatur sedemikian rupa oleh pemerintah berkuasa. Orang-orang yang berada dalam oposisi, kedudukan, fungsi, hingga keputusan-keputusan yang diberikan telah ditentukan oleh penguasa.

Konsep oposisi seperti ini mungkin akan berhasil mendukung pemerintah di awal-awal masa pemerintahan, namun konsep ini justru dapat menjatuhkan pemerintah ketika rakyat mulai sadar jika selama ini mereka dibodohi. Rakyat yang jengah dan rindu akan perubahan akan memuncak hingga akhirnya membentuk gerakan oposisi non-formal untuk menggulingkan pemerintahan yang berkuasa saat itu.


2. Oposisi destruktif oportunistis

Oposisi destruktif oportunistis adalah konsep oposisi yang selalu berusaha untuk merusak citra pemerintahan melalui cara apapun. Segala kebijakan yang dibuat oleh pemerintah akan selalu dikritik dan dicari kesalahannya, bahkan ketika kebijakan tersebut sesungguhnya baik untuk rakyat. Kelemahan-kelemahan pemerintah yang disorot dalam konsep oposisi destruktif-oportunistis ini diharapkan dapat merusak kewibawaan penguasa sehingga golongan oposisi dapat melakukan kudeta secara mudah. Tujuan dari golongan oposisi

destruktif oportunis ini adalah untuk menjatuhkan penguasa secepat mungkin sehingga mereka dapat mengambil alih pemerintah.

2. Oposisi Fundamental Ideologis


Oposisi fundamental ideologis merupakan konsep oposisi yang tidak jauh berbeda dengan oposisi kedua, yakni oposisi destruktif oportunis. Kedua konsep oposisi ini sama-sama menginginkan kejatuhan penguasa supaya dapat digantikan oleh penguasa yang lain. Satu hal yang membuat kedua konsep oposisi ini berbeda adalah adanya unsur ideologi yang dibawa dalam oposisi fundamental ideologis.



Konsep oposisi fundamental ideologis merupakan konsep oposisi yang tidak sekadar menginginkan adanya penggantian penguasa, namun sampai ke tataran ideologis. Mereka menganggap jika dasar negara yang dianut selama ini tidak tepat, sehingga ingin mengganti dengan dasar negara yang mereka anggap lebih baik. Kaum oposisi fundamental ideologis ini tergerak menjadi oposisi karena dorongan faham. Entah itu bersandar pada religi, sosialisme, komunisme, nasionalisme, pluralisme dan lain lain.

3. Oposisi Konstruktif Demokratis

Kelompok oposisi konstruktif demokratis dapat disebut sebagai konsep oposisi yang paling baik dibandingkan tiga konsep oposisi sebelumnya. Konsep oposisi konstruktif demokratis terbentuk sebagai bentuk perjuangan golongan oposisi untuk kepentingan masyarakat umum. Jika tiga konsep oposisi sebelumnya justru berpotensi mengacaukan tatanan yang ada karena hanya akan menggantikan otoritarian lama dengan otoritarian yang baru, maka oposisi konstruktif demokratis berfungsi untuk menciptakan keseimbangan yang sesungguhnya.



Konsep oposisi konstruktif demokratis akan melakukan kritik kepada pemerintah jika kebijakan pemerintah dinilai merupakan rakyat. Kelompok oposisi ini juga tetap mampu melihat sisi positif yang telah dicapai oleh pemerintah sehingga rakyat dapat menilai pemerintahan secara seimbang. Kelompok oposisi konstruktif demokratis tidak pernah berniat untuk menggulingkan kekuasaan yang ada untuk digantikan dengan kekuasaan tertentu. Kelompok oposisi ini hanya akan bertindak ekstrem jika tingkah pemerintahan yang berkuasa sudah keterlaluan dan kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat tidak dapat dicegah lagi.

2. Dasar Hukum Oposisi

Syariat Islam menempati posisi sentral yang sangat menentukan sehingga segala sesuatu yang dikatakan Islam haruslah sesuai dengan hukum dan ketetapan-ketetapan yang ada didalamnya. Kata oposisi (*muaradhah*) tidak terdapat dalam al-Qur'an, tetapi bukan berarti pengertian kata itu tidak terdapat dalam sejumlah ungkapan al-Qur'an yang maknanya berkisar pada pertentangan dan oposisi. Di antara kata-kata tersebut adalah *at-tanazu* (perselisihan dan tarik menarik), *as-syijar* (pertikaian dan pertentangan) *al-jadal wa al-mujadalah* (debat dan perdebatan) kedinamisan hukum islam terletak pada dasar-dasar yang menjadi dasar dan tiang pokok bagi hukum³³.

pertikaian dan pertentangan dan *al-mujadalah*(perdebatan). Berarti mengakui tidak adanya satu pendapat yang bisa diterima oleh semua masyarakat. Untuk itu, perselisihan pendapat adalah suatu yang sudah terprediksi sehingga diperhitungkan oleh fraseologi al-Qur'an dan diasumsikan sebagai suatu realitas yang sangat mungkin terjadi. Dengan begitu, al-Qur'an tidak mengandaikan masyarakat mukmin dalam persepsi yang jauh dari realitas alami manusia yang seakan tidak mungkin bagi mereka untuk berselisih atau bertentangan, tapi al-Qur'an menegaskan adanya fenomena alami berupa perselisihan, pertentangan, dan perdebatan.³⁴

³³ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada 2013) h.43

³⁴ *Ibid.*, h.44

Kedatangan Islam dengan Al-Qur'an sebagai kitab sucinya, selain mengembalikan bangsa yang terpecah kepada persaudaraan Islam (*ukhuwah Islamiyah*) juga mengembalikan kepercayaan yang tunggal, lurus, suci, dan benar. Dalam hal ini Islam mengajarkan umatnya untuk selalu saling menasehati dan melakukan kontrol atas kekuasaan agar kebaikan selalu terpelihara dalam kehidupan masyarakat.³⁵ sebagaimana dalam firman Allah Swt :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ³⁶

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung”. (Q.S. Al-Imran 104).

Hal ini mengisyaratkan bahwa oposisi sebenarnya bukanlah sesuatu hal yang tabu dalam demokrasi Islam. Adanya oposisi ini dapat menjadi penyeimbang bagi kekuasaan pemerintah, sehingga mereka harus terbatas selalu diawasi dan dikontrol. Oposisi tidak hanya dilakukan oleh lembaga, tetapi dapat juga dilakukan oleh pribadi-pribadi dalam masyarakat Islam. Pemimpin tidak boleh menulikan telinganya dari mendengar saran dan evaluasi yang saat ini dikenal dengan pendapat orang lain atau oposisi. Oposisi adalah kritik yang

³⁵Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial* (Jakarta : Penamadani 2004) h. 170

³⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta : Pt. Aku Bisa 2014) h. 63

membangun bagi program pembangunan pemerintah serta menjelaskan kekurangannya sambil mengajukan alternatifnya.³⁷

Detailnya Allah Swt mendorong umat Islam untuk tidak hanya tinggal diam terhadap suatu kemungkaran. Mereka tidak harus terbatas hanya melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan dari diri sendiri, tetapi mereka harus berusaha sampai di semua tempat dan manusia menjadi seperti itu. Jadi, mengubah kemungkaran adalah kewajiban setiap individu. Kewajiban mengubah hal mungkar dan membela kebenaran ini, pada saat tertentu bisa menyebabkan konflik dengan lembaga pemerintah, bahkan ketika lembaga tersebut muncul dan mendasarkan legalitasnya pada agama. Justru kadang-kadang pemerintahlah yang pertama kali mengalami hal itu sebelum yang lainnya karena ada pengakuan sempurna bahwa tidak ada kekuasaan terhadap manusia kecuali bagi Allah saja.³⁸

Oleh karena itu tidak ada seorang pun yang memiliki hak istimewa menyangkut pribadinya dan bisa diwariskan pada anak-anak serta keluarga. Hal itu karena dasar legalitas bagi kekuasaan itu memberi keputusan yang sesuai dengan dasar serta prinsip-prinsip syariat dan selalu seperti itu. Jadi ia tunduk pada agama dan dikritik yang ditunjukan kepadanya atas nama agama atau dengan ungkapan lain, tunduk pada oposisi keagamaan. Hadist-hadist Rasul

³⁷ Ali Abdul Halim Mahmud, *Fikih Responsibilitas Tanggung Jawab Muslim dalam Islam* (Jakarta : Gema Insani Press) h.266

³⁸ Neveen., *Op.Cit.* h.73

Saw. Datang sebagai penguat prinsip ini. Disebutkan bahwa melaksanakan amar makruf nahi mungkar adalah identik dengan iman. Dari Hadist ini jelas bahwa oposisi yang berdasar amar makruf dan nahi mungkar memiliki tiga level. Dalam hadist yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Said Khudri berkata, aku mendengar Rasul Saw. Bersabda,

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :
مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ
أَضْعَفُ الْإِيمَانِ [رواه مسلم]³⁹

“Barang siapa diantara kalian melihat kemungkaran maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya, jika tidak bisa maka dengan lisannya, jika tidak bisa maka dengan hatinya, dan itu merupakan selema-lemahnya iman”(H.R. Muslim)

Memang secara jelas Islam mewajibkan kepada kaum muslimin untuk taat kepada *umara* dan mengharamkan kepada setiap kaum muslimin untuk mendurhakai perintah amir. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ⁴⁰ ط

³⁹ Musthafa Dib Al-Bugha, *Terjemahan Al-Wafi* (Jakarta : Pt. Mizan Publika 2007) h.407

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Nya, dan Ulil Amri diantara kalian” (Q.S An-Nisa 59)

Kepatuhan individu kepada Negara merupakan hak syar'i (hak yang bersumber pada syariat) negara atas warganya. Setiap individu wajib melaksanakan perintah-perintah, peraturan-peraturan dan rencana-rencana yang telah ditetapkan negara untuk merealisasikan kepentingan umum dan tujuan-tujuan negara. Hal ini dikarenakan ketaatan merupakan salah satu sendi hukum Islam dan kaidah ketatanegaraannya. Seseorang akan sulit membayangkan keberadaan suatu sistem yang sehat, negara yang kuat jika tidak ada pemerintahan yang adil, rakyat yang taat kepada pemimpin dan berlangsungnya musyawarah antara pemerintah dengan rakyat.⁴¹

Walaupun Islam menekankan kepada umatnya untuk mentaati *ulil amri* (pemerintah), tetapi ketaatan ini tidak bersifat absolut. Sebab ketaatan yang absolut akan mengakibatkan pemerintahan individualistis, diktator dan totalitas. Oleh karena itu Islam mewajibkan kepada rakyat untuk mentaati *ulil amri* itu dalam batas-batas tertentu.

Berkaitan dengan firman Allah “Hai orang-orang beriman taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan Ulil Amri diantara kamu,” Imam Ahmad meriwayatkan dari Ali dia berkata ” Rasulullah saw mengutus suatu pasukan yang dipimpin oleh seorang Anshar. Setelah mereka berangkat, si pemimpin

⁴⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta : Pt. Aku Bisa 2014) h. 87

⁴¹ Neveen *Op.Cit.*, h. 111

mendapat masalah untuk mengatasi mereka. “Ali berkata, “ Maka si pemimpin berkata kepada mereka, ‘Bukankah Rasulullah saw telah menyuruh kalian agar menaati ku?’ mereka mengiyakannya. Si pemimpin berkata, ‘ambilkan aku kayu bakar,’ aku menginstruksikan kepada kalian agar masuk kedalam api itu.” Ali Berkata ‘ ada pemuda berkata kepada yang lain , ‘sungguh kamu harus berlari dari api itu dan menghadap Rasulullah saw, Janganlah kamu tergesa-gesa memutuskan sebelum kamu bertemu dengan Rasulullah saw, Jika beliau menyuruhmu untuk masuk api, maka masukilah.” Ali berkata, ‘maka mereka pun kembali kepada Rasulullah seraya memberitahukan kejadian itu kepada beliau. Maka beliau bersabda,’ Apabila kalian memasukinya, niscaya kalian tidak dapat keluar lagi untuk selamanya. Sesungguhnya ketaatan itu hanya menyangkut kema’rufan. Hadis itu dikemukakan dalam sahihain dari hadis al-A’*masy*.⁴²

3. Sejarah Oposisi Islam

Dalam sistem pemerintahan Islam, khalifah, kepala negara atau imam hanyalah seorang yang dipilih umat untuk mengurus dan mengatur kepentingan mereka demi kemaslahatan bersama. Posisinya dalam masyarakat Islam digambarkan secara simbolis dalam ajaran salat berjamaah. Imam yang dipilih untuk memimpin salat berjamaah adalah orang yang memiliki kelebihan, baik dari segi kealiman, *fashaha* maupun ketakwaannya, dari yang lainnya. Dalam

⁴² M Nasib ar-Rifa’i, *Terjemahan Tafsir Ibnu Katsir 2* (Jakarta : Gema Insani 1999) h. 73

sholat tersebut imam berdiri memimpin salat hanya berjarak beberapa langkah di depan makmum. Ini dimaksudkan supaya makmum dapat mengetahui gerak gerik imam. Seandainya imam keliru dalam salat, maka makmum dapat melakukan koreksi terhadapnya tanpa mengganggu dan merusak salat itu sendiri.⁴³

Ini mengisyaratkan bahwa kepala negara bukanlah pribadi yang luar biasa, yang tidak pernah salah. Karenanya kepala negara tidak boleh berada jauh dari rakyatnya. Ia harus mendengar dan menyahuti aspirasi rakyatnya dan menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Untuk itu, kepala negara harus bisa menerima saran dan masukan dari rakyatnya. Kepala negara atau imam tidak seperti dalam pandangan Syiah Ismailiyah atau Imamiyah, bukanlah manusia suci yang terbebas dari dosa. Ia tidak punya wewenang tunggal dalam menafsirkan dan menjelaskan ketentuan-ketentuan agama.

Contoh terbaik tentang kepala negara adalah Rasulullah Muhammad Saw dan setelah itu diperlihatkan oleh khalifah Abu Bakar dan Umar ibn al-Khattab. Kedua khalifah ini mampu menjadikan diri mereka sebagai *Khadiim al-Ummah* (pelayan umat) yang mengatur dan mengurus kepentingan umat Islam. Namun pada masa pemerintahan Usman pada paruh terakhir masa kekhalifahannya, muncul perasaan tidak puas dan kecewa di kalangan umat Islam terhadapnya.

⁴³ Iqbal, *Op.Cit* . h.240-241

Kepemimpinannya Usman memang sangat berbeda dengan kepemimpinan Umar. Ini mungkin karena umurnya yang lanjut (diangkat dalam usia 70 tahun) dan sifatnya yang lemah lembut. Akhirnya, pada tahun 35 H/ 655 M, Usman dibunuh oleh kaum pemberontak yang terdiri dari orang-orang yang kecewa itu. Salah satu faktor yang menyebabkan banyak rakyat kecewa terhadap kepemimpinan Usman adalah kebijakan yang mengangkat keluarga dalam kedudukan tinggi. Yang terpenting di antaranya adalah Marwan ibn Hakam. Dialah pada dasarnya yang menjalankan pemerintahan, sedangkan Usman hanya menyandang gelar khalifah. Setelah banyak anggota keluarganya yang duduk-duduk dalam jabatan penting, Usman laksana boneka dihadapan kerabatnya itu. Ini lah yang menyebabkan Rakyat kecewa dan membentuk gerakan oposisi tokoh sahabat yang terkenal mengkritisi kebijakan Usman adalah Abu Dzar Al-Ghifari dia menentang Usman karena nepotisme dan kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi dalam pemerintahannya.⁴⁴

Pasca pembunuhan Usman, suasana memang begitu kacau. Umat Islam terpecah menjadi beberapa kelompok. Tidak semua umat Islam melakukan baiat kepada Ali. Di Syam, Mu'awiyah yang masih keluarga Usman menuntut balas kepada Ali atas kematian Usman. Ia menuduh Ali berada dibelakang kaum pemberontak. Sikap oposisi atau perlawanan Mu'awiyah ini bahkan dinyatakan secara terbuka dengan mengangkat dirinya sebagai tandingan di

⁴⁴ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo 2011) h.39

Syam. Ia bahkan mengerahkan tentaranya untuk memerangi Ali. Adapun di Makkah, Aisyah menggalang kekuatan pula bersama Thalhah dan Zubeir untuk melawan Ali. Namun demikian, Ali tetap dianggap sah menduduki jabatan khalifah, karena didukung oleh sebagian besar rakyat. Meskipun banyak pihak yang bersikap oposisi terhadap pemerintahan Ali.⁴⁵

Dalam kandungan Konstitusi Madinah yang dikeluarkan oleh Rasulullah Saw mengandung asas *Amar Makruf Nahi Munkar* ditetapkan dalam Konstitusi Madinah sebagai asas pemerintahan Negara Madinah, asas hubungan vertikal dan hubungan horizontal masyarakatnya. Asas ini di pahami dan dirumuskan dari ketetapan yang menyatakan: Dan sesungguhnya orang-orang mukmin yang bertakwa harus menentang orang yang melakukan kejahatan dari kalangan mereka atau menuntut orang yang melakukan ketidak adilan atau perbuatan dosa, atau permusuhan, atau kerusakan diantara orang-orang mukmin. Mereka semua harus menentanginya secara bersama walaupun terhadap anak salah seorang mereka (Pasal 13). Dan sesungguhnya orang-orang mukmin yang bertaqwa harus berpegang kepada petunjuk yang terbaik dan paling lurus (Pasal 20).⁴⁶

Asas ketetapan ini menekankan pada hubungan baik dan harmonis orang mukmin dengan Allah dan dengan lingkungannya. Hubungan orang-orang mukmin dengan pencipta sebagai perwujudan takwanya tercermin pada

⁴⁵ Iqbal. *Op.Cit.*, h, 86

⁴⁶ Ija Suntana, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia 2010) h. 117

menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Untuk tujuan itu, orang-orang mukmin yang bertakwa dalam sikap dan perbuatannya harus berpedoman pada petunjuk yang terbaik dan paling lurus. Tentu saja yang dimaksudkan klausa ketetapan Pasal 20 adalah berpedoman pada petunjuk wahyu Allah.⁴⁷

Wahyu yang diterima Nabi Muhammad Saw yang seluruhnya dikenal dengan al-Qur'an sedangkan cerminan ketakwaan orang-orang mukmin dalam hubungannya dengan lingkungannya atau dengan manusia lain atau dengan masyarakatnya, harus saling memberi saran dan nasehat dan berbuat kebaikan tanpa dosa (Pasal 37). Keharusan ini disebut tugas Amar Makruf. Mereka juga, menurut Pasal 13 di atas harus mencegah dan menentang segala macam tindak kejahatan, yang disebut dengan tugas Nahi Munkar. Artinya, Pasal 13 dan 20 itu menghendaki orang-orang mukmin bekerjasama dalam mewujudkan kebaikan dan takwa, dan mencegah segala macam bentuk kejahatan. Al-Qur'an juga memerintahkan kepada orang mukmin agar bekerjasama dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan tidak bekerjasama dalam berbuat dosa dan pelanggaran.⁴⁸

Ketetapan Konstitusi Madinah diketahui bahwa sifat ketakwaan orang mukmin mengandung dua dimensi. Pertama, dimensi ketuhanan, yaitu hubungan manusia dengan Allah untuk bertakwa kepada-Nya. Kedua, dimensi

⁴⁷*Ibid.*, h.118

⁴⁸*Ibid.*, h. 119

sosial, yaitu menegakkan *Amar Makruf dan Nahi Munkar* demi terwujudnya ketertiban sosial. Oleh karena itu, asas ketakwaan, *Amar Makruf dan Nahi Munkar* sebagai asas Negara Madinah menuntut masyarakatnya disamping bertakwa kepada Allah, juga harus mempunyai kepedulian sosial, baik untuk tugas Amar Makruf maupun untuk tugas Nahi Munkar. Tipe masyarakat dan pemerintahan seperti inilah yang dicita-citakan Islam, yakni suatu negara yang masyarakat dan pemerintahannya berusaha menciptakan masyarakat beriman dan bertakwa dan mengamankan kepentingan pemerintahan dalam mencapai tujuannya.⁴⁹

Tujuan pemerintahan itu ialah mewujudkan hak atas kesejahteraan dunia dan melarang yang diharamkan. Dengan demikian, masyarakat dan pemerintahan bergerak di atas jalan yang diridhoi Allah. Islam memperlakukan kepala negara tidak berbeda dengan manusia lainnya. Ia memperoleh kehormatan dan kemuliaan yang lebih besar dalam masyarakatnya hanya karena sebagai pemimpin yang memerintah atas nama umat. Namun hal ini sesuai dengan besarnya tugas dan tanggungjawabnya. Karena kedudukannya yang sama dengan manusia lainnya, kepala negara juga harus tunduk kepada hukum dan peraturan yang berlaku. Kepala negara dapat dikenai hukum pidana atas kejahatan yang dilakukannya dan perbuatan-perbuatannya yang melampaui batas kewenangannya. Kepala negara, dalam kapasitasnya sebagai kepala

⁴⁹*Ibid.*, h. 120

pemerintahan negara Islam, mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang dengan kedudukannya.

4. Pemikiran Politik Aliran Oposisi

a. Aliran Revolusi

Islam sangat mengedepankan prinsip untuk menghormati privasi dan kepentingan pihak lain islam sangatlah ramah dengan prinsip non-intervensi, namun dalam batas tertentu penerimaan terhadap nalar non-intervensi tidak harus bermakna kepada penerimaan prinsip permisivisme. Dalam Islam sudah jelas mana hubungan yang dilandasi itikad baik yang harus dijaga, mana hubungan yang dilandasi dengan itikad buruk harus segera diakhiri.⁵⁰

Aliran Revolusioner Islam yang menyatakan oposisi mereka melalui revolusi, ketika menjelaskan legalitas pelaksanaan revolusi tersebut berdasar pada al-Qur'an yang mewajibkan masyarakat untuk bersama-sama melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Penggunaan kekuatan untuk mengubah kemungkaran adalah suatu kewajiban yang memiliki prioritas pertama. Kasus ini diistilahkan dengan Kisah Abu Bakar Dalam rangka mewujudkan negara sebagai alat untuk mewujudkan kemaslahatan bersama itulah, hukum islam tidak mengenal kekuasaan tak terbatas dari pemerintah.

⁵⁰ Surwandono dan Sidiq Ahmadi , *Resolusi Konflik Di Dunia Islam*, (Yogyakarta : Graha Ilmu 2011) h.49

hukum Islam memandang bahwa kepala negara harus dibatasi. Maka ketika Abu Bakar dan para Khulafaur rasyidin diba'iat menjadi khalifah, beliau berpidato: "Taatlah kepadaku selama aku taat kepada Allah. Jika aku tidak taat kepada Allah, kalian tidak wajib taat kepada ku."⁵¹

. Pemilik pendapat ini mendasarkan pada firman Allah :

وَأَتَىٰكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ⁵²

"Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf mencegah pada yang mungkar merekalah orang-orang yang beruntung." (Q.S. Al-Imran 104)

Para pemilik kecenderungan revolusioner melihat bahwa jika amar ma'ruf telah berada pada batas *ad-da'watu bi illati hiya ahsan* (mengajak dengan cara yang lebih baik) maka nahi mungkarnya telah melewati batasan ini menuju tindakan yang menjamin berhentinya perbuatan mungkar tersebut. Rasul Saw. Bersabda,

⁵¹Abdul Djalil dan Imam Nakha'i, *Fiqh Rakyat pertautan Fiqh Dengan Kekuasaan*, (Yogyakarta : LkiS 2000) h. 21

⁵²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta : PT. Aku Bisa 2014) h. 63

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :
مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَكَذَلِكَ
أَضْعَفُ الْإِيمَانِ [رواه مسلم]⁵³

“Barang siapa diantara kalian melihat kemungkaran maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya, jika tidak bisa maka dengan lisannya, jika tidak bisa maka dengan hatinya, dan itu merupakan selemah-lemahnya iman”(H.R. Muslim)

pada hadist ini mengubah kemungkaran dengan tangan, yakni dengan tindakan dan kekuatan lebih didahulukan dari pada cara-cara perubahan lainnya.. Diantara makna *ats-saurah* (revolusi) adalah berhijrah dari kondisi menyerah dan diam ke kondisi bergerak dan memberontak. Ia berarti meninggalkan keterbelakangan dan kegelapan. Dalam hijrah ini manusia dan masyarakat meninggalkan situasi yang lalim dan kondisi sewenang-wenang tersebut kemudian menggantinya dengan kondisi dan situasi yang lebih cemerlang. Jadi, hijrah tidak dipandang sebagai tindakan pasif yang dianggap oleh pengikut aliran revolusi sebagai kewajiban karena mereka tidak meninggalkan masyarakat yang lalim untuk kemudian mengubahnya berarti juga berbuat lalim pada diri mereka sendiri dan inilah puncak

⁵³Musthafa Dib Al-Bugha, *Terjemahan Al-Wafi* (Jakarta : Pt. Mizan Publika 2007) h.407

kelaliman sebab efeknya akan menimpa seluruh masyarakat, kepetingan dan nilai-nilai masyarakat.⁵⁴

Dari situlah tampak jelas sejauh mana dukungan al-Qur'an terhadap masalah revolusi dalam menghadapi kelaliman dan kesewenang-wenangan. Bahkan, mereka tertindas dinegeri pun tidak lepas dari tanggung jawab kewajiban mengubah kelaliman. Hijrah merupakan salah satu cara perubahan tersebut. Itu karena kalau kita menerima logika penyerahan diri terhadap kesewenang-wenangan maka penyerahan diri tersebut berseberangan dengan kehendak Allah Swt, yaitu kehendak yang dikonsepsi al-Qur'an pada sebuah ayatnya yang oleh sebagian pakar dilihat telah mengekspresikan makna dan kekuatan-kekuatan revolusioner. Khawarij dan beberapa kelompok Syiah mempresentasikan panji aliran revolusi secara ide dan praktiknya. Mereka berpendapat harus menggunakan kekerasan revolusi, kekuatan, dan pedang sebagai cara yang wajib dilakukan untuk mencapai kemenangan dalam melawan kelaliman dan kerusakan.⁵⁵

b. Aliran Sabar

Sabar adalah paham mayoritas Ahlusunnah dan jalan mereka dalam menghadapi kelaliman, ketidakadilan, atau kesewenang-wenangan. Dalam hal ini mereka berpendapat bahwa bagi penguasa yang tidak adil akan mendapat dosa dan bagi seorang mukmin adalah bersabar. Sebenarnya

⁵⁴Neveen *Op.Cit.*, hlm 383

⁵⁵ *Ibid.*, hlm 237

tekanan keras yang menimpa oposisi Islam sepanjang masa turut bertanggung jawab sampai batas-batas sangat besar dalam mendukung prinsip sabar dan prinsip-prinsip lainnya yang sesuai dengan ide tersebut, seperti ide *al-irja'* yang menghilangkan dosa tidak membela kebenaran dari pundak seorang mukmin. Itu karena beban akibat menjalankan kewajiban amar makruf nahi mungkar sangat besar sampai-sampai bersabar terhadap kemungkaran jauh lebih ringan daripada melarang adanya kemungkaran tersebut. Pada dasarnya, sabar bukanlah tingkah laku yang tidak menunjukkan oposisi seperti yang terlintas dalam pikiran. Begitu juga, revolusi pun tidak selalu menjadi cara paling ideal dalam menunjukkan oposisi seperti yang terlintas juga dalam pikiran.⁵⁶

Sebuah tingkah laku untuk bisa dianggap menunjukkan oposisi, itu berdasar pada sejumlah kondisi lain yang akan memberinya karakter tersebut atau tidak. Untuk mengenal hakekat madzhab sabar Islam dan memahami pemikiran aliran tersebut kita akan mulai dengan mendefinisikan makna sabar itu sendiri sebagai bentuk tingkah laku keislaman sehingga kita bisa mengukur lembah sabar dalam kapasitasnya sebagai ide keislaman yang memiliki maksud sangat dalam. Sabar merupakan salah satu cara pengungkapan oposisi Islam adalah sabar yang bagaimanapun juga tidak menyetujui atau menerima legalitas serta konstitusionalnya kezaliman dan

⁵⁶*Ibid.*, hlm. 306

kesewenang-wenangan, tetapi ia berkaitan dengan syarat *al-istitha'ah* (kemampuan) yang dinyatakan hadist, “Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran maka ubahlah kemungkaran dengan tangannya, jika tidak mampu maka dengan lisannya, jika tidak mampu maka dengan hatinya dan itu merupakan selemah-lemahnya iman.” Jadi, sabar dalam konsistensinya sebagai cara untuk mengungkapkan oposisi Islam adalah menahan jiwa dari apa yang diharuskan akal dan syariat agar tidak menyerah terhadap kemungkaran dan mentapkan konstitusionalnya.

Sesungguhnya konsistensi mayoritas ahlusunnah dalam memegang prinsip sabar merupakan bentuk dari kepatuhan mereka terhadap ketetapan dan perintah Allah sehingga apapun yang terjadi dalam sistem perpolitikan aliran ini menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Swt. Sebab, sabar dalam al-Qur'an pada kebanyakan ayat yang memuat kata itu disebut sebagai tindakan terpuji sehingga penyandanginya akan diberi pahala paling mulia karena ia telah patuh, konsisten dan tunduk terhadap hukum serta perintah Allah.⁵⁷

Sabar terhadap kemungkaran untuk mengantisipasi munculnya bahaya yang lebih besar adalah lebih baik daripada mencegah kemungkaran itu, yaitu memilih salah satu dari dua bahaya yang paling ringan. Jadi, sabar bagaimanapun juga bukan berarti mengakui legalitas atau konstitusionalnya

⁵⁷*Ibid.*, h. 307

kezaliman dan kemungkaran, melainkan adalah sikap yang dipaksakan oleh kondisi positif tertentu sehingga bersabar merupakan sesuatu keistimewaan karena tidak ada jalan keluar kecuali hal itu. Sikap kelompok Ahlusunnah terbatas pada kewajiban amar makruf nahi mungkar dengan dakwah dan nasehat saja, atau bahkan pada saat tidak adanya kapabelitas cukup dengan pengingkaran di hati saja tanpa harus menghunus pedang, yaitu dengan Revolusi.

c. Aliran Kapabelitas

Aliran Kapabelitas hadir untuk memberi tambahan prinsip lain bagi revolusi Islam, yaitu prinsip kapabelitas sebagai syarat yang diharapkan demi keberhasilan oposisi revolusioner. Syarat ini terhitung sebagai reaksi atas pengamalan-pengamalan revolusi yang gagal karena tidak benar-benar menguasai sejumlah faktor penyebab keberhasilan revolusi. Untuk itu, penganut aliran ini memiliki ciri khas bahwa mereka akan bersabar sampai berada dalam kondisi yang memungkinkan untuk mensukseskan oposisinya.⁵⁸

Begitulah, aliran ini tampak sepertinya merupakan mendiasi antara aliran revolusi dan sabar. Syarat kapabelitas muncul sebagai konsekuensi dari sejumlah kegagalan revolusi yang tidak ada persiapan cukup untuk kapabelitas. Untuk itu, syarat kapabelitas dibuat demi menjamin suksesnya

⁵⁸ *Ibid.*, h. 383

revolusi. Amr bin Ubaid salah seorang Muktazilah pada masa Mansur Abbasi yang mensyaratkan kapabelitas dan sempurnanya syarat-syarat pemberontakan. Kebetulan tekadnya ini muncul karena kegagalan yang menimpa revolusi Zaid bin Ali 122 H, revolusi Yahya bin Zai tahun 125 H, dan revolusi Yazid Bin Walid tahun 126 H.

Untuk itu sepanjang hidupnya , oposisi yang ia lakukan sebatas memutus dan menolak bekerjasama dengan negara tanpa mengadakan pemberontakan karena tidak ada syarat kapabelitas. Syarat kapabelitas merupakan garis tengah antara menyerah, sabar, dan menunggu solusi dari langit dengan pemberontakan dan revolusi yang belum dipelajari. Untuk itu, kita bisa mengatakan bahwa seluruh mazhab keislaman telah mengekspresikan syarat tersebut dengan berbagai bentuk. Aliran-aliran revolusioner melihat terwujudnya syarat ini jika sudah terdapat fasilitas dan potensi serendah apapun, sedangkan aliran sabar menunggu melihat bahwa syarat tersebut membutuhkan sejumlah banyak faktor untuk dapat mewujudkannya.⁵⁹

Semua aliran keislaman tidak menentang prinsip oposisi, tetapi sebaliknya , aliran-aliran itu dengan segala kekuatan mendukung oposisi selama oposisi tersebut legal. Perbedaan-perbedaan yang terjadi diantara mereka membawa kedalam berbagai aliran yang berasal dari ijtihad-ijtihad

⁵⁹*Ibid.*, h. 385

pemikiran dan pengalamn-pengalaman historis. Abu hanifah dan Muktazilah merupakan dua panji utama dalam aliaran kapabelitas.

5. Tugas Oposisi

Tugas oposisi adalah memastikan sisitem ketatanegaraan Islam memiliki asas operasional yang terdiri atas empat hal, yaitu asas persamaan (*al-musawah*), asas keadilan (*al-adalah*), asas musyawarah (*asy-syura*), dan asas kebebasan (*al-huriyyah*).

a. Asas Persamaan (*Mabda al-musawah*)

Asas persamaan yang diperjuangkan oleh golongan oposisi memiliki arti bahwa setiap individu memiliki derajat yang sama sebagai warga negara tanpa mempertimbangkan asal-usul, ras, agama, bahasa, dan status sosial. Semua orang memiliki kesamaan dalam hal menuntut dan dituntut, yaitu menuntut hak dan dituntut hak melaksanakan kewajiban.

Persamaan dalam doktrin ketatanegaraan Islam adalah persamaan konstitusional (*qanuniyyah*), bukan persamaan faktual (*fa'liyyah*). Artinya, persamaan yang diajarkan oleh Islam adalah semua orang harus dijamin setara oleh undang-undang, walaupun dalam kenyataan faktual mereka memiliki perbedaan, baik secara fisik, kapasitas intelektual, dan kekayaan. Doktrin persamaan ketatanegaraan ini berbeda dengan doktrin persamaan dalam masyarakat sosialis yang menggagas kesamaan faktual bukan

kesamaan konstitusional. Asas persamaan Islam menganut doktrin persamaan proporsional yang terdapat dalam ajaran agama Islam.⁶⁰

Asas persamaan (*mabda al-musawah*) merupakan bawaan Islam yang berbeda sekali dengan asas masyarakat sebelumnya. Ia merupakan implementasi dari keyakinan bahwa tuhan itu hanya satu, yaitu Allah sehingga seluruh makhluk setara dihadapan-Nya. Mereka sama-sama memiliki hak dan kewajiban tanpa dibedakan ras, warna kulit, kebangsaan, dan kekayaan. Asas persamaan dalam Islam membuka ruang yang lebar kepada semua orang untuk mengakses kekuasaan. Tidak ada suku tertentu yang memiliki keistimewaan tersendiri dalam mengakses kekuasaan.

b. Asas Keadilan (*al-adalah*)

Keadilan merupakan asas kedua dari asas-asas operasional ketatanegaraan Islam yang diperjuangkan dalam oposisi. Secara doktrin, keadilan merupakan ciri khas Islam sebagai agama yang membedakannya dari agama-agama yang lainnya. Ketika agama yahudi terbedakan sebagai agama keras dan kristen sebagai agama cinta, Islam memiliki identitas khas sebagai agama adil. Secara operasional, identitas khas ini mewarnai setiap sub-sub ajarannya, seperti politik, sosial, ekonomi, dan lain-lain.⁶¹

⁶⁰ Ija, *Op.Cit.*, h.31

⁶¹ *Ibid.*, h.42

Dalam ranah ketatanegaraan, asas keadilan mengandung arti bahwa konstitusi yang dibuat oleh suatu negara harus memosisikan diri setiap warga negara secara sama dalam menerima hak dan memberikan kewajiban. Konstitusi yang dibuat harus menjamin bahwa setiap individu terjamin dan terpenuhi haknya. Setiap kekayaan yang terdapat diwilayahnya dapat diakses oleh semua orang, tanpa kecuali. Terkait dengan asas keadilan, hasil pengelolaan kekayaan alam oleh negara harus terdistribusikan secara merata kepada semua orang sehingga setiap individu berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan menikmati hasilnya secara nyata.

Menurut para ahli ketatanegaraan Islam, keadilan adalah sebuah ramuan sangat penting dari *maqasid sayrai'ah*. Sulit terbentuk sebuah masyarakat yang sejahtera dan makmur tanpa ada keadilan. Islam sangat tegas terhadap setiap bentuk ketidakadilan dalam suatu negara. dengan asas keadilan, Islam bertujuan membasmi setiap tindakan yang mencabut hak-hak orang lain untuk mengakses sumber-sumber kekayaan alam dalam suatu negara.

c. Asas Musyawarah (*as-syura*)

Musyawarah merupakan asas ketiga dari asas-asas operasional ketatanegaraan Islam yang diperjuangkan dalam oposisi. Asas musyawarah dikembangkan dari sebuah perintah dalam al-Qur'an untuk melakukan

musyawarah. Selain memerintahkan, al-Qur'an juga menyebutkan bahwa musyawarah adalah asas pengambilan keputusan yang selalu dipegang oleh orang-orang beriman. Istilah teknis yang digunakan oleh al-Qur'an untuk menyebut asas ini adalah *syura*'.⁶²

Dalam hadis Rasulullah Saw. Terdapat sebuah kata yang menunjukan musyawarah sebagai asas kebijakan. Kata yang dipergunakan oleh Rasulullah Saw. Adalah *masyurah*. Menurut An-Nabhani, *syura* adalah musyawarah atau tukar pendapat tanpa terikat oleh keharusan melaksanakan hasilnya, sedangkan *masyurah* adalah musayawah atau tukar pendapat yang hasilnya wajib dilaksanakan.

Musyawarah adalah unsur asasi sistem kebijakan politik, sosial, dan ekonomi masyarakat muslim. Muhammad Amarah menyebutkan bahwa musyawarah adalah wahana peran serta masyarakat dalam membuat kebijakan publik. Umar Syarif menyebutkan bahwa musyawarah adalah basis ideologi politik Islam, selain sebagai landasan langkah negara dalam mengambil kebijakan. Hamdi Zaquq menyebutkan bahwa di antara ciri khas sistem ekonomi Islam adalah sistem yang dibangun di atas landasan musyawarah.⁶³

⁶² *Ibid.*, h. 52

⁶³ *Ibid.*, h.62

4. Asas Kebebasan (*al-hurriyah*)

Kebebasan merupakan asas keempat dari asas-asas operasional ketatanegaraan Islam yang diperjuangkan oleh oposisi. Kebebasan (*al-hurriyah*) adalah kewenangan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak merugikan pihak lain. Berdasarkan asas kebebasan Islam, semua masyarakat dalam suatu negara harus diakui oleh konstitusinya sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk berbuat.

Doktrin ketatanegaraan Islam hanya mengakui kebebasan konstitusional, tidak mengakui kebebasan emosional (berdasarkan hawa nafsu). Kebebasan konstitusional merupakan lambang kesucian yang mesti didapatkan oleh semua orang. Asas kebebasan Islam mengajarkan bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk bertindak dan pergi ke mana saja, tanpa takut ditangkap atau dipenjara. Tindakannya tidak boleh dihukum, kecuali karena hukum.

Beberapa warga negara yang mesti dilindungi oleh negara dan bersifat umum adalah, (1) kebebasan hak milik, (2) kebebasan tempat tinggal, (3) kebebasan berakidah, (4) kebebasan berpendapat, (5) kebebasan berusaha, (6) kebebasan belajar, (7) kebebasan berpolitik. Asas kebebasan dalam doktrin ketatanegaraan Islam menyangkut dengan hak. Hak adalah sifat yang melekat pada seseorang dan mesti dipenuhi oleh pihak lain.

6. Tujuan Oposisi

Oposisi sebagai suatu fenomena dan prinsip dasar dalam aktivitas telah dikenal oleh realitas kehidupan politik Islam, baik dalam bentuk pemikiran maupun dalam bentuk gerakan. Oposisi sebagai kata yang digunakan dalam untuk menunjukkan perbedaan, evaluasi, perbandingan, pertanggungjawaban, pelaksanaan, dan mendatangkan hal yang bertentangan adalah kata orisinil secara bahasa dan maknanya. kata oposisi digunakan untuk menunjukkan makna-makna di atas, baik dalam lingkup sastra, syair Arab maupun dalam lingkup pemikiran politik yang berkaitan dengan paham dan madzhab-madzhab Islam.⁶⁴

Pertikaian dan pertentangan dan *al-mujadalah*(perdebatan). Berarti mengakui tidak adanya satu pendapat yang bisa diterima oleh semua masyarakat. Untuk itu, perselisihan pendapat adalah suatu yang sudah terprediksi sehingga diperhitungkan oleh fraseologi al-Qur'an dan diasumsikan sebagai suatu realitas yang sangat mungkin terjadi. Dengan begitu, al-Qur'an tidak mengandaikan masyarakat mukmin dalam persepsi yang jauh dari realitas alami manusia yang seakan tidak mungkin bagi mereka untuk berselisih atau bertentangan, tapi al-Qur'an menegaskan adanya fenomena alami berupa perselisihan, pertentangan, dan perdebatan. Kedatangan Islam dengan Al-Qur'an sebagai kitab sucinya, selain

⁶⁴ Neveen. *Op.Cit.*, h. 437

mengembalikan bangsa yang terpecah kepada persaudaraan Islam (*ukhuwah Islamiyah*) juga mengembalikan kepercayaan yang tunggal, lurus, suci, dan benar. Dalam hal ini Islam mengajarkan umatnya untuk selalu saling menasehati dan melakukan kontrol atas kekuasaan agar kebaikan selalu terpelihara dalam kehidupan masyarakat.⁶⁵

Tujuan oposisi berkisar pada suatu esensi dasar, yaitu bahwa pemikiran dan gerakan-gerakan oposisi pada dasarnya diarahkan kepada penguasa yang zalim atau tidak legal menurut sudut pandang gerakan-gerakan oposisi dan pemikirannya. Sebab, ketika penguasa tidak berada pada keadilan dan legal maka kewajiban taat terhadap penguasa yang menetapkan hukum sesuai dengan syari'at adalah wajib. Corak yang signifikan bagi oposisi yang tampak dalam pemikiran politik Islam adalah bentuk hegemoni variable agama yang termanifestasi dalam syari'at dan dasar-dasarnya. Selama terdapat ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul yang merupakan dasar keadilan dan dasar legalitas maka ketaatan terhadap pemimpin hukumnya wajib. Adapun selama terdapat kemaksiatan terhadap Allah dan Rasul-Nya maka tidak ada ketaatan dan kepatuhan terhadap pemimpin. dengan kata lain oposisi bertujuan untuk mengingatkan pemerintah agar tetap memprioritaskan kepentingan rakyat. Sikap seperti ini

⁶⁵Said .*Op.Cit*, h. 170

dalam Islam sangat dianjurkan untuk menegaskan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*.⁶⁶



⁶⁶ Neveen, *Op.Cit.* h. 438

BAB III

LAPORAN PENELITIAN

A. Sejarah Partai Gerindra

Bermula dari Keprihatinan, Partai Gerindra lahir untuk mengangkat rakyat dari jerat kemelaratan, akibat permainan orang-orang yang tidak peduli pada kesejahteraan. Dalam sebuah perjalanan menuju Bandara Soekarno-Hatta, terjadi obrolan antara intelektual muda Fadli Zon dan pengusaha Hashim Djojohadikusumo. Ketika itu, November 2007, keduanya membahas politik terkini, yang jauh dari nilai-nilai demokrasi sesungguhnya. Demokrasi sudah dibajak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan memiliki kapital besar. Akibatnya, rakyat hanya jadi alat.⁶⁷

Bahkan, siapapun yang tidak memiliki kekuasaan ekonomi dan politik akan dengan mudah jadi korban. Kebetulan, salah satu korban itu adalah Hashim sendiri. Dia diperkarakan ke pengadilan dengan tuduhan mencuri benda-benda purbakala dari Museum Radya Pustaka, Solo, Jawa tengah. “Padahal Pak Hashim ingin melestarikan benda-benda cagar budaya,” kata Fadli mengenang peristiwa itu. Bila keadaan ini dibiarkan, negara hanya akan diperintah oleh para mafia. Fadli Zon lalu mengutip kata-kata politisi Inggris abad kedelapan belas, Edmund Burke: “*The only thing necessary for the triumph [of evil] is for good men to do nothing.*” (kalau orang baik-baik tidak berbuat apa-apa, maka para penjahat yang

⁶⁷Sejarah Partai Gerindra (On-line), tersedia di: <http://PartaiGerindra.or.id/> (4 Januari 2019)

akan bertindak) terinspirasi oleh kata-kata tersebut, Hashim pun setuju bila ada sebuah partai baru yang memberikan haluan baru dan harapan baru. Tujuannya tidak lain, agar negara ini bisa diperintah oleh manusia yang memerhatikan kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan golongannya saja. Sementara kondisi yang sedang berjalan, justru memaksakan demokrasi di tengah himpitan kemiskinan, yang hanya berujung pada kekacauan.⁶⁸

Gagasan pendirian partai pun kemudian diwacanakan di lingkaran orang-orang Hashim dan Prabowo. Rupanya, tidak semua setuju. Ada pula yang menolak, dengan alasan bila ingin ikut terlibat dalam proses politik sebaiknya ikut saja pada partai politik yang ada. Kebetulan, Prabowo adalah anggota Dewan Penasihat Partai Golkar, sehingga bisa mencalonkan diri maju menjadi ketua umum. Namun, ketika itu Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla adalah wakil presiden mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Mana mau Jusuf Kalla memberikan jabatan Ketua Umum Golkar kepada Prabowo?” kata Fadli.

Setelah perdebatan cukup panjang dan alot, akhirnya disepakati perlu ada partai baru yang benar-benar memiliki manifesto perjuangan demi kesejahteraan rakyat. Untuk mematangkan konsep partai, pada Desember 2007, di sebuah rumah, yang menjadi markas IPS (Institute for Policy Studies) di Bendungan Hilir, berkumpul sejumlah nama. Selain Fadli Zon, hadir pula Ahmad Muzani, M.

⁶⁸Sejarah Partai Gerindra (On-line), tersedia di: <http://PartaiGerindra.or.id/> (4 Januari 2019)

Asrian Mirza, Amran Nasution, Halida Hatta, Tanya Alwi, Haris Bobihoe, Sufmi Dasco Ahmad, Muchdi Pr, Widjono Hardjanto dan Prof Suhardi. Mereka membicarakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai yang akan dibentuk. “Pembahasan dilakukan siang dan malam,” kenang Fadli. Karena padatnya jadwal pembuatan AD/ART , akhirnya fisik Fadli ambruk juga. Lelaki yang menjabat sebagai Direktur Eksekutif di IPS ini harus dirawat di rumah sakit selama dua minggu.⁶⁹

Fadli tidak tahu lagi bagaimana kelanjutan partai baru ini. Bahkan dia merasa pesimistis bahwa gagasan pembentukan partai baru itu akan terus berlanjut. Namun diluar dugaan, ketika Hashim datang menjenguk di rumah sakit, Hashim tetap antusias pada gagasan awal untuk mendirikan partai politik. Akhirnya, pembentukan partai pun terus dilakukan secara maraton. Hingga akhirnya, nama Gerindra muncul, diciptakan oleh Hashim sendiri. Sedangkan lambang kepala burung garuda digagas oleh Prabowo Subianto.

Pembentukan Partai Gerindra terbilang mendesak. Sebab dideklarasikan berdekatan dengan waktu pendaftaran dan masa kampanye pemilihan umum, yakni pada 6 Februari 2008. Dalam deklarasi itu, termaktub visi, misi dan manifesto perjuangan partai, yakni terwujudnya tatanan masyarakat indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis, adil dan makmur serta beradab dan

⁶⁹ Sejarah Partai Gerindra (On-line), tersedia di: <http://PartaiGerindra.or.id/> (4 Januari 2019)

berketuhanan yang berlandaskan Pancasila sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945.⁷⁰

Budaya bangsa dan wawasan kebangsaan harus menjadi modal utama untuk mengeratkan persatuan dan kesatuan. Sehingga perbedaan di antara kita justru menjadi rahmat dan menjadi kekuatan bangsa indonesia. Namun demikian mayoritas rakyat masih berkubang dalam penderitaan, sistem politik kita tidak mampu merumuskan dan melaksanakan perekonomian nasional untuk mengangkat harkat dan martabat mayoritas bangsa indonesia dari kemelaratan. Bahkan dalam upaya membangun bangsa, kita terjebak dalam sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar telah memporak-porandakan perekonomian bangsa, yang menyebabkan situasi yang sulit bagi kehidupan rakyat dan bangsa.

Hal itu berakibat menggelembungnya jumlah rakyat yang miskin dan menganggur. Pada situasi demikian, tidak ada pilihan lain bagi bangsa indonesia ini kecuali harus menciptakan suasana kemandirian bangsa dengan membangun sistem ekonomi kerakyatan. Partai Gerindra terpanggil untuk memberikan pengabdianya bagi bangsa dan negara dan bertekad memperjuangkan kemakmuran dan keadilan di segala bidang. Memberi nama partai politik gampang-gampang susah. Karena nama partai berkaitan dengan persepsi yang akan diingat oleh masyarakat selaku konstituen.

⁷⁰ Sejarah Partai Gerindra (On-line), tersedia di: <http://PartaiGerindra.or.id/> (4 Januari 2019)

Sebelum nama Gerindra muncul, para pendiri partai ini seperti Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, Fadli Zon dan Muchdi Pr juga harus memikirkan nama yang tepat. Ketika itu di Bangkok, Thailand, mereka berkumpul untuk acara Sea Games Desember 2007, demi mendukung tim Indonesia, terutama polo dan pencak silat yang berhasil lolos untuk dipertandingkan di sana.⁷¹

Kebetulan Prabowo adalah ketua IPSI (Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia). Namun ajang kumpul-kumpul tersebut kemudian dimanfaatkan untuk membahas nama dan lambang partai. Nama partai harus memperlihatkan karakter dan ideologi yang nasionalis dan kerakyatan sebagaimana manifesto Gerindra. tersebutlah nama “Partai Indonesia Raya”. Nama yang sebenarnya tepat, namun sayang pernah digunakan di masa lalu, yakni PIR (Partai Indonesia Raya) dan Parindra. “Kalau begitu pakai kata GERAKAN, jadi Gerakan Indonesia Raya,” ucap Hashim penuh semangat. Peserta rapat pun kemudian menyetujuinya. Selain gampang diucapkan, juga mudah diingat: Gerindra, begitu bila disingkat. Setelah persoalan nama selesai, tinggal soal lambang. Lambang apa yang layak digunakan?

Muncul ide untuk menggunakan burung garuda. Namun, ini lambang yang sudah banyak digunakan partai lain. Apalagi simbol Pancasila yang tergantung di dada garuda, mulai dari bintang, padi kapas, rantai, sampai kepala banteng dan pohon beringin, sudah digunakan oleh partai yang ada sekarang. Untuk

⁷¹ Sejarah Partai Gerindra (On-line), tersedia di: <http://PartaiGerindra.or.id/> (4 Januari 2019)

menemukan lambang yang tepat, Fadli Zon mengadakan survei kecil-kecilan. Hasilnya, sebagian masyarakat justru menyukai bila Gerindra menggunakan lambang harimau. Harimau adalah binatang yang sangat perkasa dan menggetarkan lawan bila mengaum. Namun, Prabowo memiliki ide lain, yakni kepala burung garuda, ya hanya kepalanya saja. Gagasan itu disampaikan oleh Prabowo sendiri, yang juga disetujui oleh pendiri partai yang lain.⁷²

Maka jadilah Partai Gerindra yang kita kenal sekarang. Perpaduan antara nama dan lambang yang tepat, sebab keduanya menggambarkan semangat kemandirian, keberanian dan kemakmuran rakyat. Kepala burung garuda yang menghadap ke kanan, melambangkan keberanian dalam bersikap dan bertindak. Sisik di leher berjumlah 17, jengger dan jambul 8 buah, bulu telinga 4 buah, dan bingkai gambar segi lima yang seluruhnya mengandung arti hari kemerdekaan, 17-8-1945. Dalam perjalanannya kemudian, terbukti, Gerindra mendapatkan tempat di hati masyarakat, meski berusia muda. Ketika kampanye gencar dilakukan, burung garuda dan suaranya ikut memberi latar belakang sehingga para penonton merasa tergugah dengan iklan tersebut. Partai Gerindra berdiri berdasarkan akta notaris di Jakarta tanggal 6 Februari 2008, dengan Notaris Ny. Liena Latief.

⁷²Sejarah Partai Gerindra (On-line), tersedia di: <http://PartaiGerindra.or.id/> (4 Januari 2019)

Kepengurusan struktur partai di 28 propinsi dan 255 tingkat kabupaten/kota. Termasuk sejumlah kepengurusan partai dibawahnya yaitu tingkat kecamatan.⁷³

B. Visi dan Misi Partai Gerindra

Visi :

Menjadi partai politik yang mampu menciptakan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial dan tatanan politik negara yang melandaskan diri pada nilai-nilai nasionalisme dan religiusitas dalam wadah NKRI yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945 yang senantiasa berdaulat dibidang politik, berkepribadian di bidang budaya dan berdiri diatas kaki sendiri dalam bidang ekonomi

Misi :

1. Mempertahankan kedaulatan dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945.
3. Mendorong pembangunan nasional yang menitikberatkan pada pembangunan ekonomi kerakyatan, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan bagi seluruh warga bangsa.

⁷³Sejarah Partai Gerindra (On-line), tersedia di: <http://PartaiGerindra.or.id/> (4 Januari 2019)

4. Membentuk tatanan sosial dan politik masyarakat yang kondusif untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan kesejahteraan rakyat.
4. Menegakkan supremasi hukum dengan mengedepankan azas praduga tak bersalah dan persamaan hak di hadapan hukum serta melindungi seluruh warga Negara Indonesia secara berkeadilan tanpa memandang suku, agama, ras dan/atau latar belakang golongan.
5. Merebut kekuasaan pemerintahan secara konstitusional melalui Pemilu Legislatif , Pemilu Presiden dan Pemilu Kepala Daerah untuk menciptakan lapisan kepemimpinan nasional yang kuat dan bersih disetiap tingkat pemerintahan.⁷⁴

C. Jati Diri Partai Gerindra

Jati Diri Partai GERINDRA adalah:

1. Kebangsaan = Partai Gerindra adalah partai yang berwawasan kebangsaan yang berpegang teguh pada karakter nasionalisme yang kuat, tangguh, dan mandiri. Wawasan kebangsaan ini menjadi jiwa dalam mewujudkan segala aspek kehidupan bernegara yang sejahtera, jaya dan sentosa .
2. Kerakyatan = Partai Gerindra adalah partai yang dibentuk dari, oleh, dan untuk rakyat sebagai pemilik kedaulatan yang sah atas Republik Indonesia.

⁷⁴Dokumentasi, Manifesto Partai Gerindra Jakarta, dicatat september 2008. h. 16-17

Keberpihakan pada kepentingan rakyat merupakan sebuah keniscayaan dalam arti semua pihak yakin untuk mewujudkan secara optimal hak-hak seluruh rakyat dalam segala aspek kehidupannya utamanya di bidang kehidupan politiknya terlebih lagi kehidupan kegiatan ekonominya.

3. Religius = Partai Gerindra adalah partai yang memegang teguh nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kebebasan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Nilai-nilai religius senantiasa menjadi landasan bagi setiap jajaran pengurus, anggota, dan kader Partai Gerindra dalam bersikap dan bertindak.

4. Keadilan Sosial = Partai Gerindra adalah partai yang mencita-citakan suatu tatanan masyarakat yang berkeadilan sosial, yakni masyarakat yang adil secara ekonomi, politik, hukum, pendidikan, dan kesetaraan gender. Keadilan sosial harus didasari atas persamaan hak, pemerataan, dan penghargaan terhadap hak asasi manusia.⁷⁵

D. Pokok-Pokok Perjuangan Partai Gerindra

Dalam mewujudkan visi-misi berpegang teguh pada nilai dasar, partai Gerindra memiliki pokok-pokok perjuangan yang akan dilaksanakan dan diperjuangkan dalam berbagai kebijakan nasional secara konstitusional, antara lain:

⁷⁵ *Dokumentasi*, Manifesto Partai Gerindra Jakarta, dicatat september 2008. h. 15

1. Bidang politik
2. Bidang ekonomi
3. Bidang kesejahteraan rakyat
4. Bidang pertanian, perikanan, dan kelautan
5. Bidang lingkungan hidup dan kehutanan
6. Bidang sosial, budaya, dan perikanan
7. Bidang hukum
8. Bidang hak asasi manusia
9. Bidang pertahanan
10. Bidang otonomi daerah
11. Bidang agama
12. Bidang politik luar negeri dan hubungan internasional
13. Bidang hak-hak perempuan
14. Bidang pemuda
15. Bidang perburuhan
16. Bidang riset dan teknologi⁷⁶



⁷⁶*Dokumentasi*, Manifesto Partai Gerindra Jakarta, dicatat september 2008. h. 20

E. Struktur Organisasi Partai Gerindra

Partai Gerindra berdiri berdasarkan akta notaris di Jakarta tanggal 6 Februari 2008, dengan Notaris Ny.Liena Latief. Kepengurusan struktur partai di 28 propinsi dan 255 tingkat kabupaten/kota. Termasuk sejumlah kepengurusan partai dibawahnya yaitu tingkat kecamatan. Berikut struktur partai Gerindra Dewan pimpinan pusat partai⁷⁷ :

Ketua umum dan ketua Dewan Pembina: H. Prabowo Subianto

1. Wakil Ketua Umum bidang Politik dalam negeri dan pemerintahan: Fadli Zon, S.S.,M.Sc.
2. Wakil Ketua Umum Bidang Luar Negeri: Mayjen TNI (Purn) Yogi Magyo Yusuf.
3. Wakil ketua Umum bidang Pertahanan dan Keamanan: Mayjen TNI (Purn) Chaerawan Musyirawan.
4. Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan SDM: Dr. Sumarjati Arjoso.
5. Wakil Ketua Umum Bidang Buruh dan ketenagakerjaan: Arief Puyuono.
6. Wakil Ketua Umum Bidang Ekonomi Keuangan dan Industri. Murphy Hutagalung, MBA.
7. Wakil Ketua Umum Bidang Pembangunan Pertanian Kehutanan dan Energi: Edhy Prabowo,MM,MBA.

⁷⁷Dokumentasi, Manifesto Partai Gerindra Jakarta, dicatat september 2008.h. 3

8. Wakil Ketua Umum Bidang Koperasi UMKM dan ekonomi Kreatif Dr. Marwah Daud Ibrahim.
9. Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi dan Keanggotaan. Widjono Hardjanto.
10. Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Massa: Fery Joko Yuliantono.
11. Wakil Ketua Umum Bidang Ideologi: Rachmawati Soekarnoputri.
12. Wakil Ketua Umum Bidang Kaderisasi dan Informasi: Sugiono.
13. Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan Advokasi: Sufmi Dasco Ahmad.
14. Wakil Ketua Umum Bidang Pemuda dan Olahraga: Purnowo.
15. Sekretaris Jenderal: Ahmad Muzani.
16. Bendahara Umum: T.A. Muliatna Djiwandono.

G. Gerindra di Parlemen

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menetapkan 560 anggota DPR RI Periode 2014-2019 secara resmi. Muncul sebagai pemenang ketiga dalam Pemilu Legislatif (Pileg) 9 April 2014 yang lalu adalah Partai Gerindra dengan 14.760.371 suara atau 11,81 persen. Berdasarkan penghitungan KPU, Partai Gerindra berhasil meraih 73 kursi atau 13 persen di DPR. Lembaga penyelenggara Pemilu itu akan menyerahkan hasil tersebut ke pengurus pusat partai dengan tembusan calon anggota DPR terpilih. Sekedar diketahui, Gerindra dalam Pileg kali ini sukses mendapatkan kursi di 29 provinsi. Sedangkan empat lainnya mereka gagal. Perubahan politik yang terus berlangsung selama proses demokratisasi telah

membuka peluang lebih besar bagi terciptanya kebebasan politik, kehadiran partai oposisi di parlemen, serta semakin menguatnya peran partai oposisi di parlemen.⁷⁸

Berkembangnya peran oposisi di dalam parlemen tersebut, akan sangat kondusif terhadap berkurangnya kekuatan oposisi sporadis di luar parlemen yang dapat mengganggu jalanya pemerintahan, tetapi juga tidak mendukung pencapaian tujuan beroposisinya partai politik di parlemen, yaitu menjalankan peran kontrol dan perimbangan (*checks and balances*) secara terlembaga, sebagaimana dikenal dalam relasi eksekutif-legislatif dalam sistem presidensial. Dengan berjalannya mekanisme *checks and balances* tersebut, secara proporsional lembaga-lembaga politik dan sosial menjadi lebih fungsional serta dapat menjalankan perannya masing-masing, sehingga peran kontrol dikembalikan pada fungsi parlemen, bukan dibebankan pada kekuatan sosial di luar parlemen.

Alasannya cukup jelas karena kekuatan-kekuatan oposisi di luar parlemen sering kali kurang kondusif bagi perkembangan demokrasi secara umum, ketika kemudian berubah menjadi anarki. Dengan demikian partai oposisi di parlemen tetap menjadi hal yang penting. kendatipun di berbagai negara demokrasi modern masyarakat cukup mampu memproduksi kekuatan melawan (*contravailing forces*), tetapi kekuatan oposisi di parlemen yang *powerful* dapat menjaga pertanggungjawaban secara reguler dan menjamin suatu sistem tetap terbuka.

⁷⁸Tuswoyo Admojo, “Peran Partai Oposisi di Parlemen Pasca Pemilu Presiden 2014” (Jurnal Politik UI, 2 Februari 2016) h.5

Kebijakan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto untuk menjadikan partainya sebagai partai oposisi, setelah kalah dalam pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2014, dapat dilihat sebagai langkah awal pelebagaan oposisi pasca reformasi politik 1998. Gerindra memosisikan sebagai partai oposisi dan tidak bersedia untuk bergabung dengan kabinet pimpinan Jokowi-Jusuf Kalla. Dalam perjalanannya sebagai partai oposisi, Gerindra mampu menjalankan perannya secara aktif dengan cara melakukan kritik dan kontrol politik terhadap berbagai kebijakan yang dianggap bertentangan dengan visi politik atau ideologi kerakyatan yang dijadikan justifikasi beroposisinya Gerindra.⁷⁹

Dengan cara demikian, berbagai kebijakan pemerintah tidak begitu saja dapat diimplementasikan tanpa terlebih dahulu memperoleh kritik dari partai oposisi. Partai oposisi dapat memengaruhi partai-partai politik di DPR baik yang tergabung dalam koalisi pemerintah maupun yang netral, untuk mendukung penggunaan hak-hak yang melekat pada lembaga tersebut, seperti hak angket maupun hak interpelasi. Sikap konsisten Prabowo untuk tetap melanjutkan kebijakan beroposisinya telah menuai hasil yang relatif positif. Berbagai kebijakan yang disampaikan partai oposisi untuk mempersoalkan dan mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat telah meningkatkan dukungan pemilih terhadap Gerindra di satu pihak dan penurunan dukungan pemilih terhadap PDI-P di pihak lain. Berikut beberapa Peran Partai Gerindra di Parlemen :

⁷⁹*Ibid.*, hlm. 7

1. Pembentukan pansus tenaga kerja asing (TKA)

Pembentukan pansus tenaga kerja asing (TKA) pertama kali diusulkan oleh wakil ketua DPR Fadli Zon dan anggota DPR Romo Syafi'i. Dalam rapat DPR tanggal 26 April 2018 kedua politikus Gerindra itu menanda tangani *Term of Reference* (TOR) pembentukan pansus TKA sebagai respon atas perpres nomor 20 tahun 2018. Pembentukan pansus ini kemudian banyak disetujui oleh partai-partai yang lain meskipun ada juga pihak yang kontra. Penolakan ini di dasari oleh pemikiran bahwa perpres No.20/2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing yang dinilai sebagai karpet merah masuknya tenaga kerja asing di Indonesia.⁸⁰

2. Kritik impor beras

Dalam rapat komisi DPR bersama badan urusan logistik (Bulog) tanggal 24 Mei 2018 di Senayan Jakarta. ketua komisi IV DPR RI sekaligus Ketua fraksi partai Gerindra DPR RI Edhy Prabowo menyatakan pihaknya menolak rencana pemerintah mengimpor beras 1 juta ton. Kesimpulan rapat itu menyatakan komisi IV DPR dan Bulog menolak rencana impor beras, selama stok dalam negeri cukup memenuhi stok pangan nasional Pemerintah seharusnya melakukan maksimalisasi penyerapan gabah atau beras milik petani. Gabah dan beras petani harus diprioritaskan untuk diserap pemerintah, bukannya malah impor beras, karena kebijakan impor beras ini merupakan bentuk penghianatan terhadap petani.

2. Tolak Revisi UU KPK

⁸⁰*Ibid.* hlm. 9

Dalam rapat pleno badan legislasi (Baleg) di gedung DPR, Senayan, Jakarta hari rabu tanggal 10 febrauri 2016 sembialn fraksi menyetujui revisi UU KPK untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu menjadi usul inisiatif DPR dan ditetapkan di paripurna. hanya Fraksi Gerindra yang menolak. Pernyataan sikap Gerindra menolak dalam rapat pleno adalah bentuk kekhawatiran bahwa revisi UU KPK akan berujung pelemahan kepada lembaga anti-rasuah tersebut.⁸¹

Sikap kritis kelompok oposisi tersebut merupakan perkembangan positif bila dilihat dari aspek berperannya partai oposisi di parlemen. Mengingat sikap kritis yang muncul sejalan dengan kepentingan masyarakat, bukan sekedar asal beda. Masyarakat yang berharap agar komitmen pemerintah untuk mengutamakan kepentingan rakyat, kemudian diakomodasi oleh Gerindra untuk menekan pemerintah agar tetap memperhatikan kepentingan rakyat. Meskipun belum cukup untuk mendelegitimasi posisi kekuasaan pemerintah, apa yang dilakukan oleh Gerindra itu menandakan berperannya oposisi yang efektif karena pemerintah segera menanggapi terkait kritik yang dilakukan diparlemen.

F. Eksisitensi Partai Gerindra Sebagai Oposisi Dalam Sistem Pemerintahan

Di Indonesia

Jumlah penduduk miskin di Indonesia (penduduk yang berada dibawah garis Kemiskinan) masih relatif tinggi baik menurut ukuran BPS maupun standar

⁸¹ *Ibid.*, hlm 10

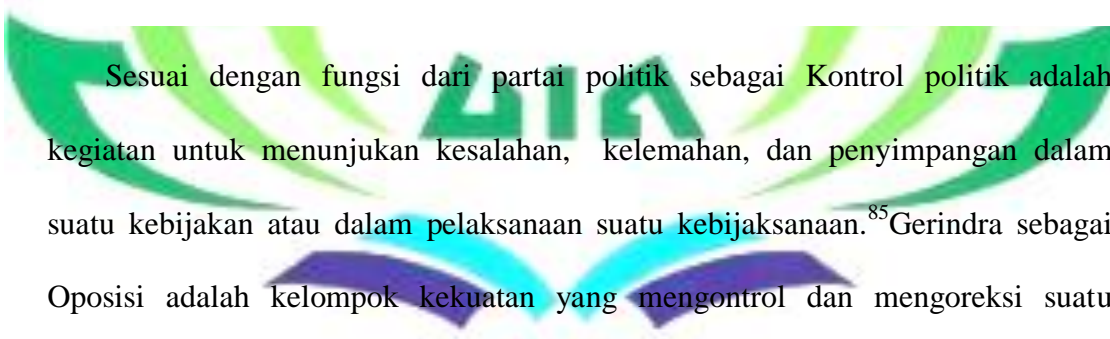
Internasional. Sebagian besar penduduk miskin tinggal dipedesaan. Jumlah pengangguran pun tetap tinggi. Kondisi ini diperparah dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) secara diam-diam yang berdampak langsung pada peningkatan jumlah penduduk miskin dan pengangguran. Kemiskinan dan pengangguran masih menjadi permasalahan besar bagi bangsa ini. Bahkan di era Reformasi, kemiskinan sudah berubah wujud menjadi bentuk kemiskinan yang sistematis. Dalam hal ini kemiskinan adalah hasil dari kegagalan pemerintah dalam mengatur negara.⁸² Kesejahteraan rakyat masih jauh dari harapan. Penciptaan lapangan kerja harus ditingkatkan sehingga pengangguran dapat ditekan.

Sementara itu, petani, warga terbesar di republik ini, dengan hanya memiliki rata-rata 0,3 hektar telah dihipit oleh kemiskinan struktural. Nilai tukar petani (*term of trade*) yang fluktuatif ditambah lagi dengan langkah pemerintah untuk mengimpor beras yang menyebabkan pendapatan para petani tidak mencukupi untuk meningkatkan kesejahteraan. Nelayan pun senantiasa hidup dalam lingkaran kemiskinan yang tak berujung. Akses terhadap permodalan yang minim, penggunaan teknologi penangkapan ikan masih tradisional, serta keberpihakan pemerintah yang minim pada sektor perikanan dan kelautan, menjadi rangkaian simpul kemiskinan yang selalu menyandera nelayan. Kebijakan terkait dengan

⁸² *Dokumentasi*, Manifesto Partai Gerindra Jakarta, dicatat september 2008. h. 32

kesejahteraan rakyat yang selama ini di implementasikan oleh pemerintah cenderung bersifat temporer, kuratif, dan sumbangan.⁸³

Pemberian bantuan langsung tunai (BLT) misalnya, lebih merupakan akibat dari kenaikan harga BBM yang cenderung bersifat amal dan tidak mendidik masyarakat miskin. Dibiidang Hukum , terjadi reduksi makna hukum. hukum hanya sebatas peraturan perundang-undangan, prosedur lebih menonjol dibandingkan keadilan substansi. Orang bila tidak ikut prosedur dianggap salah, sehingga prosedur kemudian menjadi hukum itu sendiri, tidak melihat komitmen dan tujuan dibuatnya hukum sebagai upaya mewujudkan keadilan. Permasalahan semakin rumit ketika para penegak hukum pun mengalami dekadensi moral.⁸⁴



Sesuai dengan fungsi dari partai politik sebagai Kontrol politik adalah kegiatan untuk menunjukan kesalahan, kelemahan, dan penyimpangan dalam suatu kebijakan atau dalam pelaksanaan suatu kebijaksanaan.⁸⁵ Gerindra sebagai Oposisi adalah kelompok kekuatan yang mengontrol dan mengoreksi suatu kebijakan pemerintah yang dianggap keliru dan salah. Hal inilah yang sering disuarakan oleh wakil-wakil rakyat yang berada di parlemen untuk memperjuangkan kepentingan rakyat baik dipolitik, bidang ekonomi, bidang pertanian, perikanan, dan kelautan, bidang lingkungan hidup dan kehutanan, bidang sosial, budaya, dan perikanan, bidang hukum, bidang hak asasi manusia, bidang

⁸³ *Dokumentasi*, Manifesto Partai Gerindra Jakarta, dicatat september 2008. h. 33

⁸⁴ Dede Mariana dan Caroline Paskarina, *Demokrasi Dan Politik Desentralisasi*, (Yogyakarta : Graha Ilmu 2008) h.18

⁸⁵ Philipus dan Nurul Aini, *Sosiologi dan Politik*, (Jakarta : Raja Grafindo 2011) h.123

pertahanan, bidang otonomi daerah, bidang agama, bidang politik luar negeri dan hubungan internasional, bidang hak-hak perempuan, bidang pemuda, bidang perburuhan, bidang riset dan teknologi. Karna rakyat sebagai warga negara memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan di muka hukum, setiap warga negara berhak atas pekerjaan, setiap warga negara berhak atas penghidupan dan kesehatan yang layak, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan amanat UUD 1945.⁸⁶

Satu persatu anggota Koalisi Merah Putih (KMP) mulai merapat ke pemerintah. Politikus Partai Gerindra Ahyar Maliki yang menjabat sebagai Juru bicara Dewan Pimpinan Daerah Gerindra Provinsi Lampung mengatakan, pihaknya tak menyoal bila Gerindra ditinggal sendirian sebagai oposisi. Menurutnya, dinamika politik dapat berubah saat mencapai suatu kepentingan tertentu. Dari awal sebenarnya kita sudah hitung, oposisi mau sendiri, mau sama kawan-kawan itu sama saja. Jadi kami sudah perhitungan ini sejak awal bahwa koalisi sifatnya sementara karena kepentingan politik, Gerindra tetap akan berkomitmen sebagai oposisi dan tidak berminat bergabung dengan pemerintahan Jokowi-JK. Ahyar menyatakan, Gerindra akan terus mengkritisi kebijakan pemerintah yang tak sesuai dengan keinginan rakyat.⁸⁷

⁸⁶ Wahidin, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Bogor : In Media 2013) h.20

⁸⁷ Ahyar Maliki, Wawancara Dengan Sekertaris DPD Partai Gerindra Provinsi Lampung, Bandar Lampung. 4 Januari 2019.

Kami sudah komit akan berkoalisi dengan rakyat apa yang terbaik bagi rakyat, itu yang terbaik bagi Gerindra, Dia menambahkan, menjadi oposisi bagi Gerindra sama terhormatnya dengan berada di pemerintahan. Sebab, partainya dapat memberikan kontrol terhadap kebijakan pemerintah. Bukan berarti tidak setuju dengan pemerintahan. Kalau baik untuk rakyat, kita dukung, sebaliknya kalau tidak baik, kita kritik. Tapi kritik kita bukan berarti asal saja. Kita cari alternatif lainnya dengan pertimbangan, Sekedar diketahui, Partai Golkar resmi menyatakan dukungannya kepada pemerintah. Dukungan tersebut disampaikan langsung Aburizal Bakrie (saat itu Ketua Umum Partai Golkar, kini Ketua Dewan Pembina) di hadapan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam penutupan Rapimnas. Sebelumnya PAN dipimpin Zulkifli Hasan sudah terlebih dahulu menyatakan bergabung bersama pemerintahan Jokowi-JK.

PPP kubu Djan Faridz pun menunjukkan hal serupa. Berikut bentuk kritik-kritik yang dilakukan oleh Partai Gerindra terhadap kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan Aspirasi Rakyat :

1. Kritik Impor Beras

Ahyar Maliki juru bicara Dewan Pimpinan Daerah Gerindra Provinsi Lampung menyampaikan bahwa kritik terhadap pemerintah selalu dilakukan oleh partai Gerindra melalui wakil rakyat yang berada di parlemen seperti yang dilakukan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon memberikan kritik kepada pemerintah terkait

wacana impor beras. Dalam kritiknya itu, Fadli Zon menyebutkan bahwa pemerintah tidak transparan dalam masalah impor beras. Pasalnya, tambahan impor beras sebesar 1 juta ton baru diketahui masyarakat baru-baru ini. Ia menjelaskan, dalam pandangan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, impor beras bisa mengakibatkan harga gabah di tingkat petani anjlok.⁸⁸

Lebih lanjut, Fadli Zon berpendapat bahwa kebijakan impor beras ini merupakan bentuk penghianatan terhadap petani. Berikut kritik lengkap Fadli Zon mengenai hal tersebut :

- a. Melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) pemerintah telah mengeluarkan penugasan kepada Bulog untuk melakukan tambahan impor beras sebanyak 1 juta ton. Dengan begitu, hingga Agustus 2018 total izin impor beras telah mencapai 2 juta ton.
- b. Saya menyebut pemerintah telah bertindak tidak transparan dalam masalah impor beras, mengingat tambahan izin 1 juta ton itu baru diketahui masyarakat belakangan.
- c. Padahal, izin tersebut telah diteken pemerintah sejak tiga bulan lalu. Itu sebabnya, HKTI menolak kebijakan impor beras.
- d. Dalam pandangan kami di impor beras akan menyebabkan harga gabah di tingkat petani anjlok. Ujungnya, kehidupan petani bakal kian terpuruk.

⁸⁸ Ahyar Maliki, Wawancara Dengan Sekertaris DPD Partai Gerindra Provinsi Lampung, Bandar Lampung. 4 Januari 2019.

e. Jadi, kebijakan impor beras hingga dua juta ton ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap petani. Itu sebabnya HKTI menolak kebijakan tersebut.

f. Untuk memenuhi stok pangan nasional Pemerintah seharusnya melakukan maksimalisasi penyerapan gabah atau beras milik petani. Gabah dan beras petani harus diprioritaskan untuk diserap pemerintah, bukannya malah impor beras.

g. Kalau pun harga gabah dan beras petani lebih mahal dari beras import harus tetap diserap, toh yang untung petani kita sendiri.

h. Jika gudang Bulog diisi oleh gabah dan beras petani, pendapatan petani akan meningkat. Daya beli mereka juga akan naik. Sayangnya, alih-alih menolong petani bangsa sendiri, pilihan kebijakan pemerintah selalu saja impor, yang secara tidak langsung lebih suka menolong petani dari negara lain.

i. Kebijakan impor beras jangan dijadikan solusi permanen. Itu sebabnya HKTI juga meminta kepada Pemerintah untuk mendorong peningkatan produktivitas petani kita, agar dalam jangka panjang kita bisa memutus impor beras tersebut.⁸⁹

2. Kritik UU Ormas

Gunadi Ibrahim ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Provinsi Lampung menyampaikan bahwa Partai Gerindra menginginkan agar fungsi

⁸⁹ Ahyar Maliki, Wawancara Dengan Sekertaris DPD Partai Gerindra Provinsi Lampung, Bandar Lampung. 4 Januari 2019.

yudikatif dikembalikan dalam revisi undang-undang hasil pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Sehingga, pembubaran suatu ormas harus melalui pengadilan, sebagaimana tertuang dalam undang-undang sebelumnya Nomor 17 Tahun 2013. Jika diusulkan Prolegnas (Program Legislasi Nasional) dan direvisi, poin penting pertama adalah mengembalikan fungsi yudikatif, yaitu pengadilan, hal inilah yang selalu disuarakan oleh wakil rakyat yang berada di parlemen seperti Ahmad Muzani wakil ketua MPR RI fraksi Gerindra Dapil Lampung, Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Kalau Negara hukum harus kembali ke hukum. Berarti pengadilan, tentunya. Menurut dia, hukum harus dijadikan sebagai panglima di negara ini. Kalau ada yang berselisih ormas dengan pemerintah, nanti pengadilan memutuskan, Kemudian yang perlu direvisi lagi, mengenai tahapan atau proses pembubaran suatu ormas, dimulai dengan peringatan. pembubaran suatu ormas diawali dengan peringatan menjadi rasional.⁹⁰

Dia berpandangan, poin lain yang perlu direvisi mengenai hukuman. Hukuman yang tertuang dalam undang-undang hasil pengesahan Perppu Ormas dianggap terlalu berlebihan. Hukuman 5-20 tahun itu berlebihan, ini hukuman lebih berat dari zaman kolonial Belanda. Terakhir, tidak boleh ada pasal karet dalam undang-undang tersebut. Sekarang yang dianggap melanggar Pancasila

⁹⁰Gunadi Ibrahim, Wawancara dengan Ketua DPD partai Gerindra Provinsi Lampung, Bandar Lampung, 14 Januari 2019.

itu apa definisinya. Orang korupsi aja jelas-jelas crime ordinary aja miliaran hukuman cuma berapa, dua tahun. Bayangkan di mana rasa keadilannya. Partai Gerindra berencana mengajukan judicial review (Uji Materiil) terkait pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembubaran Ormas ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Gerindra tidak menutup kemungkinan komunikasi dengan Ormas yang menolak dan ingin mengajukan judicial review terhadap UU tersebut.

Sebelumnya Ahmad Muzani juga sempat mengatakan, indeks demokrasi Indonesia kini telah menurun. Hal itu terjadi karena adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 yang kini telah disahkan menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembubaran Ormas. Dan terbukti indeks demokrasi kita turun. Salah satunya karena adanya Perppu ini. Perppu ini mengkerangkeng kebebasan berserikat dan berkumpul sesuai yang dijamin UUD kita.⁹¹

3. Kritik Revisi UU KPK

Fraksi Partai Gerindra menolak wacana revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Wacana itu muncul seiring dengan temuan sementara dari Pansus Angket KPK.

⁹¹Gunadi Ibrahim, Wawancara dengan Ketua DPD partai Gerindra Provinsi Lampung, Bandar Lampung, 14 Januari 2019.

Mihdar Ilyaswakil ketua umum DPD Gerindra Provinsi Lampung mengatakan, UU KPK saat ini sudah memadai sehingga pihaknya akan menolak jika temuan sementara pansus berujung rekomendasi revisi UU KPK. Menurut kami UU KPK dengan segala macam plus minus masih bisa dipertahankan untuk memberantas, mencegah tindak pidana korupsi, Mihdar mengatakan, dengan sikap menolak revisi UU, Gerindra berharap kinerja KPK tidak terganggu dalam upaya pemberantasan korupsi.⁹²

Meski, dia mengakui bahwa masih ada kekurangan di tubuh KPK. Di sisi lain, Sekretaris Fraksi Gerindra Fary Djami Francis mengatakan fraksinya tidak bertanggungjawab dengan apapun hasil rekomendasi Pansus Angket KPK. Walaupun hingga kini pihaknya belum mengetahui arah kesimpulan pansus. Tapi kalau itu pun akhirnya dimunculkan kita menjadi fraksi yang tetap konsisten seperti awalnya kita menolak," kata Fary terpisah. Fary mengaku khawatir revisi UU KPK akan berujung pelemahan kepada lembaga anti-rasuah tersebut. Salah satunya adalah rencana membentuk dewan pengawas seperti yang pernah muncul sebelumnya.

Wacana revisi UU KPK dilontarkan oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah seiring dengan sejumlah temuan dugaan pelanggaran KPK yang ditemukan oleh Pansus Angket KPK. Terdapat 11 temuan dari Pansus KPK yang dipublikasikan. Temuan itu di antaranya kecenderungan KPK menjadi

⁹²Mihdar Ilyas, Wawancara dengan Wakil Ketua DPD partai Gerindra Provinsi Lampung, Bandar Lampung, 14 Januari 2019.

lembaga superbodi, kecenderungan KPK berjalan sendiri dan mengedepankan penindakan dari pencegahan. Temuan lainnya, KPK dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK belum bersesuaian atau patuh atas asas-asas yang meliputi asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum dan proporsionalitas, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU KPK.⁹³

G. Faktor Penghambat Partai Gerindra sebagai Oposisi dalam sistem pemerintahan di Indonesia.

Salah satu komponen negara Demokrasi yang membedakannya dengan negara non demokrasi misalnya Sosialis, Komunis, dan Fasis adalah hadirnya unsur oposisi. Eksistensi oposisi pada dasarnya dibutuhkan, karena ia dapat sebagai pengontrol negara, agar pemerintahan dan negara dapat menghindari keadaan *abuse of power* (penyalahgunaan kekuasaan). Dengan demikian kehadiran oposisi membuat negara menjadi kuat.

Jadi bila ditinjau peranan *check and balance*-nya, oposisi bukanlah sesuatu yang mengkhawatirkan atau bahkan menakutkan. Oposisi justru dibutuhkan untuk minimal menjaga kelanggengan penyelenggaraan negara demokrasi. Oposisi kerap kali didefinisikan sebagai kelompok kekuatan yang mengontrol dan

⁹³Mihdar Ilyas, Wawancara dengan Wakil Ketua DPD partai Gerindra Provinsi Lampung, Bandar Lampung, 14 Januari 2019.

mengoreksi suatu kebijakan pemerintah yang dianggap keliru dan salah. Oposisi merupakan salah satu bentuk aktualisasi dari perbedaan pendapat di masyarakat dalam proses berbangsa dan bernegara. Dan adanya perbedaan pendapat itu orang bijak menganggapnya sebagai karunia Tuhan yang harus disyukuri menjadi indikasi ke arah demokrasi, Masalahnya, adakah kesediaan untuk berbeda pendapat, antar individu, antar kelompok masyarakat, antar warga negara dengan pemerintah, dan lebih khusus antar oposisi dan penguasa.

Kesediaan untuk mengoreksi dan mengeritik, kesediaan untuk dikoreksi dan dikritik dan kesediaan untuk berbeda pendapat inilah sebagai kunci pembuka untuk memasuki gerbang demokrasi. Namun tanpa oposisi, demokrasi itu terancam atau justru mati karena dalam demokrasi penguasa harus dikontrol. Penguasa tidak boleh dibiarkan bekerja sendiri lantaran kekuasaan itu cenderung menyimpang. Orang-orang yang sedang berkuasa bisa terjebak dalam penyalahgunaan kekuasaan. Jadi wajib diawasi dan dikontrol oleh pihak oposisi.⁹⁴ Karena itulah menurut pakar politik Arbi Sanit, keberadaan oposisi sebagai soko guru dari demokrasi dan setiap demokrasi harus memiliki oposisi, walaupun tidak semua oposisi mampu menegakkan demokrasi. Berikut faktor penghambat partai Gerindra menjalankan oposisi dalam sistem pemerintahan di Indonesia :

1. Banyaknya Partai Koalisi yang bergabung dengan Pemerintah.

⁹⁴Zaenuddin, *Op. Cit.*, h. 2-3

Partai oposisi di Indonesia saat ini banyak yang tidak menjalankan fungsi kontrol politik, dengan banyaknya partai Oposisi yang bergabung dengan pemerintahan. diawali oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada oktober 2014, Partai Amanat Nasional (PAN) sepetember 2015, dan partai Golongan Karya (GOLKAR) pada januari 2016. Keadaan ini tentunya menjadi titik lemah *check and balance* terhadap pemimpin yang berkuasa. Dalam penyaluran aspirasi kritisnya partai Gerindra sendiri sebagai partai oposisi cenderung melemah, dengan banyaknya koalisi Merah Putih yang bergabung dengan Koalisi Indonesia hebat, hal ini menunjukkan bahwa suatu koalisi yang dibentuk adalah suatu koalisi semu karna pada pemilu tahun 2019 PAN kembali bergabung dengan koalisi yang digalang partai Gerindra yaitu Koalisi Adil Makmur. Terdapat dua mekanisme partai Gerindra dalam menyalurkan sikap kritisnya terhadap pemerintah. Pertama, sikap kritis disalurkan dan dicerminkan oleh wakil-wakil partai Politik yang terdapat dalam lembaga legislatif. Dengan kata lain jika lembaga legislatif banyak yang mendukung pemerintah maka upaya kritis ini pun akan berkurang atau dengan kata lain tidak memberikan suatu dampak terhadap kebijakan pemerintah. Ketika partai Oposisi melihat ketidak beresan dalam situasi dan kondisi sosial masyarakat, mereka dapat mengusulkan rancangan undang-undang yang dapat mengubahnya. Pada kenyataanya hal ini tidak mudah dan otomatis dapat dilakukan, mengingat pola pengambilan keputusan yang cukup kompleks dan kerap terjadi negosiasi politik antarfraksi.

2. Penguasaan Media oleh Pemerintah

Langkah Kedua, yang dapat dilakukan partai Gerindra dapat menyuarakan analisis dan sikap kritisnya melalui jalur non-parlementer. Misalnya dengan melakukan diskusi dan debat publik tentang kebijakan pemerintah. bisa juga dilakukan dialog dengan media massa untuk pembentukan opini publik sehingga mendapatkan dukungan politis publik.⁹⁵ Namun hal ini tidak dapat dilakukan karena yang menjadi hambatan partai Gerindra adalah karna media dikuasai oleh pihak pemerintah sehingga untuk membuat dialog publik dengan media massa untuk pembentukan opini publik hampir tidak mungkin dilakukan oleh pihak oposisi dalam hal ini adalah Partai Gerindra.

Jika kita berbicara tentang ketidakberdayaan oposisi di Indonesia, pokok soalnya berpusar pada kekakuan struktur politik dan keterbelakangan sikap kultural kita. Maka kerap kali kita membaca analisis bahwa perkembangan kehidupan oposisi bertumpu pada suatu kata demokratisasi. Sekalipun klise, namun tampaknya memang inilah agenda utama sistem politik kita saat ini, yaitu demokratisasi dalam pengertiannya yang mendasar sebagaimana dikonseptualisasikan Robert A.Dahl dalam *Democracy Its Critics* (1989) kebebasan untuk berbeda pendapat dan pendirian. Pengembangan martabat manusia dengan otonomi menentukan nasib sendiri yang disertai otonomi moral

⁹⁵ *Op.Cit.*, Firmanzah h. 73

untuk bertanggung jawab serta kepastian melindungi dan memajukan kepentingan setiap orang.⁹⁶

⁹⁶*Ibid.*, h. 74

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Eksistensi partai Gerindra sebagai oposisi dalam sistem pemerintahan di Indonesia

Demokrasi tidak muncul begitu saja di suatu negara tanpa sebab. Demokrasi muncul dan berkembang melalui pikiran dan perjuangan individu, kelompok, dan aktor-aktor sosial. Ia lahir dan berkembang dalam dialektika kekuasaan yang panjang, sepanjang kehidupan politik negara dari waktu ke waktu. Salah satu komponen negara Demokrasi yang membedakannya dengan negara non demokrasi misalnya Sosialis, Komunis, dan Fasis adalah hadirnya unsur oposisi. Eksistensi oposisi pada dasarnya dibutuhkan, karena ia dapat sebagai pengontrol negara, agar pemerintahan dan negara dapat menghindari keadaan *abuse of power* (penyalahgunaan kekuasaan). Dengan demikian kehadiran oposisi membuat negara menjadi kuat.⁹⁷

Jadi bila ditinjau peran *check and balance*-nya, oposisi bukanlah sesuatu yang mengkhawatirkan atau bahkan menakutkan. Oposisi dibutuhkan untuk mengontrol pemerintah dari eksternal. Oposisi kerap kali di definisikan sebagai kelompok kekuatan yang mengontrol dan mengoreksi suatu kebijakan pemerintah yang dianggap keliru dan salah. oposisi merupakan salah satu bentuk aktualisasi dari perbedaan pendapat di masyarakat dalam proses berbangsa dan bernegara. Dan

⁹⁷Zaenuddin, *Op. Cit.*, h. 2-3

adanya perbedaan pendapat itu orang bijak menganggapnya sebagai karunia Tuhan yang harus disyukuri menjadi indikasi ke arah demokrasi, Masalahnya, adakah kesediaan untuk berbeda pendapat, antar individu, antar kelompok masyarakat, antar warga negara dengan pemerintah, dan lebih khusus antar oposisi dan penguasa.

Kebijakan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto untuk menjadikan partainya sebagai partai oposisi, setelah kalah dalam pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2014. Gerindra memosisikan sebagai partai oposisi dan tidak bersedia untuk bergabung dengan kabinet pimpinan Jokowi-Jusuf Kalla. Dalam perjalanannya sebagai partai oposisi, Gerindra mampu menjalankan perannya secara aktif dengan cara melakukan kritik dan kontrol politik terhadap berbagai kebijakan yang dianggap bertentangan dengan visi politik atau ideologi kerakyatan yang dijadikan justifikasi beroposisinya Gerindra.⁹⁸

Dengan cara demikian, berbagai kebijakan pemerintah tidak begitu saja dapat diimplementasikan tanpa terlebih dahulu memperoleh kritik dari partai oposisi. Partai oposisi dapat memengaruhi partai-partai politik di DPR baik yang tergabung dalam koalisi pemerintah maupun yang netral, untuk mendukung penggunaan hak-hak yang melekat pada lembaga tersebut, seperti hak angket maupun hak interpelasi yang dilakukan oleh para wakil DPR di parlemen untuk mengkritisi kebijakan pemerintah seperti kritik impor beras, kritik UU Ormas, kritik revisi UU

⁹⁸Tuswoyo Admojo, “ Peran Partai Oposisi di Parlemen Pasca Pemilu Presiden 2014” (Jurnal Politik UI, 2 Februari 2016) h. 5

KPK, dan pembentukan pansus TKA. Oposisi yang dibentuk oleh Gerindra tidak hanya bersifat Konstruktif atau membangun, namun sikap oposisi Gerindra bersifat Destruktif yang kadang merusak citra pemerintah dengan cara mencari kelemahan dan kesalahan kebijakan pemerintah yang bertujuan menghilangkan wibawa penguasa sehingga dapat mengambil simpati masyarakat.

Sikap kritis kelompok oposisi merupakan perkembangan positif bila dilihat dari aspek berperannya partai oposisi di parlemen. Mengingat sikap kritis yang muncul harus sejalan dengan kepentingan masyarakat, bukan sekedar asal beda. Masyarakat yang berharap agar komitmen pemerintah untuk mengutamakan kepentingan rakyat, kemudian diakomodasi oleh Gerindra untuk menekan pemerintah agar tetap memperhatikan kepentingan rakyat. Meskipun belum cukup untuk mendelegitimasi posisi kekuasaan pemerintah, apa yang dilakukan oleh Gerindra itu menandakan berperannya oposisi karena pemerintah segera menanggapi terkait kritik yang dilakukan di parlemen.⁹⁹

B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Partai Oposisi dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia.

Sikap oposisi dalam Islam diperbolehkan bahkan sangat dianjurkan untuk menegakkan tujuan oposisi yaitu *amar ma'ruf nahi munkar*. Hal yang dilarang adalah sikap oposisi yang hanya bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan

⁹⁹*Ibid.*, h. 7

yang sah tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan.¹⁰⁰ Tugas oposisi adalah memastikan sistem ketatanegaraan Islam menjalankan asas operasional. berikut analisis penulis tentang eksistensi Gerindra sebagai oposisi ditinjau dari Fiqh Siyasah :

1. Asas Persamaan (*Mabda al-musawwah*)

Dalam musyawarah (*asy-syura*) di parlemen tanggal 26 April 2018 di senayan Jakarta wakil ketua DPR Fadli Zon dan anggota DPR Romo Syafi'i dari fraksi Gerindra mengusulkan pembentukan pansus tenaga kerja asing (TKA) dan menandatangani *term of reference* (TOR) pembentukan pansus TKA sebagai respon atas Perpres No 20 Tahun 2018. Karna perpres ini dinilai melanggar asas persamaan (*al-musawwah*) yang mana aturan ini memberikan kemudahan akses bagi tenaga kerja asing untuk bekerja di Indonesia sedangkan rakyat Indonesia sulit untuk mendapatkan pekerjaan di negaranya sendiri. Kebijakan ini dinilai sebagai karpet merah masuknya tenaga kerja asing di Indonesia.¹⁰¹

2. Asas Keadilan (*al-adalah*)

Dalam rapat (*as-syura*) komisi DPR bersama badan urusan logistik (Bulog) tanggal 24 Mei 2018 di Senayan Jakarta. ketua komisi IV DPR RI sekaligus Ketua fraksi partai Gerindra DPR RI Edhy Prabowo menyatakan pihaknya menolak rencana pemerintah mengimpor beras 1 juta ton yang dinilai melanggar asas keadilan (*al-adalah*). Kesimpulan rapat (*as-syura*) itu

¹⁰⁰Iqbal *Op.Cit.*, h. 240-241

¹⁰¹Tuswoyo, *Op.Cit.* h. 7

menyatakan komisi IV DPR dan Bulog menolak rencana impor beras, selama stok dalam negeri cukup memenuhi stok pangan nasional Pemerintah seharusnya melakukan maksimalisasi penyerapan gabah atau beras milik petani. Gabah dan beras petani harus diprioritaskan untuk diserap pemerintah, bukannya malah impor beras.

3. Asas Kebebasan (*al-hurriyah*)

Kritik selalu dilakukan oleh perwakilan fraksi Gerindra di rapat parlemen (*as-syura*) karena menurut Gunadi Ibrahim indeks demokrasi Indonesia kini telah menurun. Hal itu terjadi karena adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 yang kini telah disahkan menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembubaran Ormas. Perppu ini mengkerangkeng kebebasan berserikat dan berkumpul sesuai yang dijamin UUD dan asas operasional Islam yaitu kebebasan (*al-hurriyah*).¹⁰²

Semua yang dilakukan Gerindra dalam oposisi Konstruktif sesuai dengan tujuan oposisi yaitu menegakan *amar makruf nahi mungkar* karena Islam mengajarkan umatnya untuk selalu saling menasehati dan melakukan kontrol atas kekuasaan agar kebaikan selalu terpelihara dalam kehidupan masyarakat sebagaimana dalam firman Allah Swt:

¹⁰²Gunadi Ibrahim, Wawancara dengan Ketua DPD partai Gerindra Provinsi Lampung, Bandar Lampung, 14 Januari 2019.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

103

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung”. (Q.S. Al-Imran 104).

Hal ini mengisyaratkan bahwa oposisi sebenarnya bukanlah sesuatu hal yang tabu dalam nomokrasi Islam. Adanya oposisi ini dapat menjadi penyeimbang bagi kekuasaan pemerintah, sehingga mereka harus terbatas selalu diawasi dan dikontrol. Oposisi tidak hanya dilakukan oleh lembaga, tetapi dapat juga dilakukan oleh pribadi-pribadi dalam masyarakat Islam.¹⁰⁴

Detailnya Allah Swt mendorong umat Islam untuk tidak hanya tinggal diam terhadap suatu kemungkaran. Mereka tidak harus terbatas hanya melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan dari diri sendiri, tetapi mereka harus berusaha sampai di semua tempat dan manusia menjadi seperti itu. Jadi, mengubah kemungkaran adalah kewajiban setiap individu. Hadis-hadis Rasul Saw. Datang sebagai penguat prinsip ini. Disebutkan bahwa melaksanakan *amar makruf nahi mungkar* adalah identik dengan iman.¹⁰⁵ Dari Hadis ini jelas bahwa oposisi yang berdasar amar makruf dan nahi mungkar memiliki tiga level. Dalam hadist

¹⁰³Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta : Pt. Aku Bisa 2014) h. 63

¹⁰⁴Iqbal.*Op.Cit.*, h. 240-241

¹⁰⁵Neveen.*Op.Cit.* h.73

yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Said Khudri berkata, aku mendengar
Rasul Saw. Bersabda :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :
مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ
أَضْعَفُ الْإِيمَانِ [رواه مسلم]¹⁰⁶

“Barang siapa diantara kalian melihat kemungkaran maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya, jika tidak bisa maka dengan lisannya, jika tidak bisa maka dengan hatinya, dan itu merupakan selemah-lemahnya iman.”(HR. Muslim).



¹⁰⁶Musthafa Dib Al-Bugha, *Terjemahan Al-Wafi* (Jakarta : Pt. Mizan Publika 2007) h.407

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan dalam Bab terdahulu dapatlah diambil kesimpulan, yaitu :

1. Gerindra sebagai Oposisi adalah kelompok kekuatan yang mengontrol dan mengoreksi suatu kebijakan pemerintah yang dianggap keliru dan salah. Baik buruk kondisi yang terjadi perlu dikritisi. Menganalisa setiap perkembangan dalam masyarakat perlu melihat kualitas struktur peraturan yang membentuknya. Sehingga, mau tidak mau, partai Gerindra perlu terus-menerus melihat keterkaitan antara kondisi dan situasi sosial dengan setiap kebijakan dan peraturan pemerintah. Gerindra sebagai oposisi memperjuangkan persamaan hak dalam masyarakat, berusaha menegakan keadilan, dan memperjuangkan kebebasan masyarakat untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. Analisa kebijakan yang ditetapkan oleh pihak yang berkuasa perlu dilakukan terus-menerus. Hal ini sebagai tanggung jawab organisasi, sosial, dan moral dari partai Gerindra sebagai oposisi. Hal inilah yang sering di suarakan oleh wakil-wakil rakyat yang berada di parlemen.
2. Gerakan oposisi di Indonesia yang dilakukan partai Gerindra merupakan sikap penentangan terhadap kesewenangan pemerintah yang berkuasa, dengan kata lain sikap ini bertujuan untuk mengingatkan pemerintah agar tetap

memprioritaskan kepentingan rakyat. Sikap seperti ini dalam Islam diperbolehkan bahkan sangat dianjurkan untuk menegakkan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*. Tugas oposisi yang dilakukan Gerindra adalah memastikan sistem ketatanegaraan Islam memiliki asas operasional yang terdiri atas empat hal, yaitu asas persamaan (*al-musawah*), asas keadilan (*al-adalah*), asas musyawarah (*asy-syura*), dan asas kebebasan (*al-huriyyah*). Hal yang dilarang adalah sikap oposisi yang hanya bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Islam mengajarkan umatnya untuk selalu saling menasehati dan melakukan kontrol atas kekuasaan agar kebaikan selalu terpelihara dalam kehidupan masyarakat. Allah Swt mendorong umat Islam untuk tidak hanya tinggal diam terhadap suatu kemungkaran. Mereka tidak harus terbatas hanya melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan dari diri sendiri, tetapi mereka harus berusaha sampai di semua tempat dan manusia menjadi seperti itu. Jadi, mengubah kemungkaran adalah kewajiban setiap individu.

B. Kritik

Dari hasil penelitian ini maka dapat dikemukakan beberapa kritik, yaitu sebagai berikut :

1. Gerindra melakukan oposisi yang Destruktif yang berusaha merusak citra pemerintah. yang menyoroti kelemahan-kelemahan pemerintah untuk merusak kewibawaan penguasa.

2. Adanya kader-kader Partai Gerindra yang tidak berintegritas sehingga tidak dapat memperjuangkan aspirasi rakyat.
3. Adanya kader-kader Partai Gerindra yang melaksanakan gerakan politiknya yang tidak sesuai dengan Visi Misi Partai.

C. Saran

Dari hasil penelitian maka dapat dikemukakan beberapa saran, yaitu sebagai berikut :

1. Kepada Ketua, Pengurus, Kader, serta simpatisan DPD Partai Gerindra Provinsi Lampung agar konsisten melakukan Oposisi konstruktif secara konsisten dan objektif baik di parlemen maupun di luar parlemen terhadap kebijakan pemerintah yang di anggap salah.
2. Kepada Pengurus DPD Partai Gerindra Provinsi Lampung agar mendukung kader yang Berintegritas, yang dapat memperjuangkan Aspirasi rakyat.
3. Kepada ketua, pengurus, Kader Partai Gerindra, serta simpatisan DPD Partai Gerindra Provinsi Lampung agar menjalankan oposisi yang sesuai dengan Visi Misi Partai.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rahman , *Sistem Politik Indonesia* (Yogyakarta : Graha Ilmu 2007)
- Abdul Khaliq,Farid.*Fikih Politik Islam*, (Jakarta : Amzah 2005)
- Al-Bugha,Musthafa Dib *Terjemahan Al-Wafi* (Jakarta : Pt. Mizan Publika 2007)
- Admojo, Tuswoyo. “ Peran Partai Oposisi di Parlemen Pasca Pemilu Presiden 2014”
(Jurnal Politik UI, 2 Februari 2016)
- Cholisin dan Nasiwan, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Yogyakarta : Ombak 2012)
- Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi keempat* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011)
- Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta : Pt. Aku Bisa 2014)
- Djalil, Abdul dan Nakha'i, Imam.*Fiqh Rakyat pertautan Fiqh Dengan Kekuasaan*,
(Yogyakarta : LkiS 2000)
- Efriza, *Ilmu Politik Dari Ilmu Politik sampai Sistem Pemerintahan*, (Bandung : Alfabeta
Cv, 2008)
- Efriza , *Political Explore*, (Alfabeta : Bandung 2012)
- Firmanzah., *Mengelola Partai Politik*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2008)

Ghozali, Abdul Malik “ *Aborsi antara Hukum dan Dilema Perempuan* “, *Jurnal Al-Adalah*, Vol 9 No. 01, Juni 2010 (Bandar Lampung: Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, 2010) dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah.

Halim Mahmud, Ali Abdul. *Fikih Responsibilitas Tanggung Jawab Muslim dalam Islam* (Jakarta : Gema Insani Press)

Husin Al-Munawar,Said Agil.*Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial* (Jakarta : Penamadani 2004)

Iqbal,Muhammad.*Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014)

KhalikMusthafa , Neveen Abdul. *Oposisi Islam* (Yogyakarta : LkiS 2012)

M.Setiadi Elly dan KolipUsman, *Pengantar Sosiologi Politik*(Jakarta : Prenadamedia Group, 2015)

MD, Mahfud , *Politik Hukum Di Indonesia*, (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 2015)

Marzuki , Superman.*Politik Hukum Hak Asasi Manusia*, (Jakarta : Erlangga 2014)

Mariana, Dede dan Paskarina, Caroline. *Demokrasi Dan Politik Desentralisasi*, (Yogyakarta : Graha Ilmu 2008)

Nasib ar-Rifa'i, Muhammad. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, (Jakarta : Gema Insani Press 1999)

Pamungkas, Sri-Bintang. *Dari Orde Baru ke Indonesia Baru Lewat Reformasi Total* (Jakarta : Erlangga 2001)

Philipus dan Aini, Nurul. *Sosiologi dan Politik*, (Jakarta : Raja Grafindo 2011)

Raymond, Henry dan Agung, Singgih. *Politik Kewarganegaraan* (Jakarta : Erlangga 1999)

Sejarah Partai Gerindra (On-line), tersedia di: <http://PartaiGerindra.or.id/> (4 Januari 2019)

Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: pusat penelitian dan penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri RIL 2015)

Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik* (Jakarta : Rineka Cipta, 2006)

Suntana, Ija. *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia 2010)

Syukri Albani Nasution, Muhammad. *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada 2013)

Syafii, Inu Kencana dan Azhari, *Sistem Politik Indonesia*, (Bandung : Refika Adi Tama 2008)

Surwandono dan Ahmadi, Sidiq. *Resolusi Konflik Di Dunia Islam*, (Yogyakarta : Graha Ilmu 2011)

Wahidin .*Pendidikan Kewarganegaraan*, (Bogor : In Media 2013)

Yasid, Abu. *Fiqh Today*, (Jakarta : Erlangga, 2002)

Yatim,Badri. *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo 2011)

Zaenuddin. *Prospek Gerakan Oposisi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
2001)

Zuhraini, “ *Kontribusi Nomokrasi Islam (Rule of Islamic Law) Terhadap Negara
Hukum Pancasila*” *Jurnal Al-Adalah*, Vol 12, No (2014) (Bandar Lampung :
Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, 2014) h.1. (On-line), tersedia
di <http://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.182> (21 Mei 2019) Dapat di
pertanggung jawabkan secara ilmiah.





DEPARTEMAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

Jl. Let Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. Fax (0721) 703289

BLANKO KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Rahmatulloh

Npm : 1521020056

Pembimbing I : Dr. H. Khairuddin, M.H.

Pembimbing II : Dr. Jayusman, M.Ag

Judul Skripsi : EKSISITENSI PARTAI GERINDRA SEBAGAI OPOSISI
DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA
DITINJAU DARI FIQH SIYASAH

No	Tanggal Konsultasi	Keterangan	Paraf Pembimbing	
			I	II
1				
2				
3				

4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				



Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Khairuddin, M.H.